

### MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 39/PHPU.BUP-XXIII/2025
PERKARA NOMOR 151/PHPU.BUP-XXIII/2025
PERKARA NOMOR 152/PHPU.BUP-XXIII/2025
PERKARA NOMOR 169/PHPU.WAKO-XXIII/2025
PERKARA NOMOR 257/PHPU.GUB-XXIII/2025

PERIHAL
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM BUPATI
KABUPATEN MESUJI
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM BUPATI
KABUPATEN TAPANULI TENGAH
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM BUPATI
KABUPATEN DELI SERDANG
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM WALI KOTA
KOTA BATAM
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM GUBERNUR
SULAWESI SELATAN
TAHUN 2024

ACARA PEMERIKSAAN PENDAHULUAN

JAKARTA

KAMIS, 9 JANUARI 2025



### MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

-----

#### **RISALAH SIDANG**

#### PERKARA NOMOR 39/PHPU.BUP-XXIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Mesuji Tahun 2024
- Pemohon: Suprapto dan Fuad Amrulloh

### PERKARA NOMOR 151/PHPU.BUP-XXIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2024
- Pemohon: Khairul Kiyedi Pasaribu dan Darwin Sitompul

### PERKARA NOMOR 152/PHPU.BUP-XXIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Deli Serdang Tahun 2024
- Pemohon: M. Ali Yusuf Siregar dan Bayu Sumantri Agung

#### PERKARA NOMOR 169/PHPU.WAKO-XXIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Wali kota Kota Batam Tahun 2024
- Pemohon: Nuryanto dan Hardi Selamat Hood

#### PERKARA NOMOR 257/PHPU.GUB-XXIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Guberbur Sulawesi Selatan Tahun 2024
- Pemohon: Moh. Ramdhan Pomanto dan Azhar Arsyad. S.

#### **TERMOHON**

**KPU RI** 

#### **ACARA**

Pemeriksaan Pendahuluan

Kamis, 9 Januari 2025, Pukul 12.55 – 14.47 WIB Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI, Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

### **SUSUNAN PERSIDANGAN**

### **HAKIM KONSTITUSI**

1) Saldi Isra (Ketua)
2) Ridwan Mansyur (Anggota)
3) Arsul Sani (Anggota)

### **PANITERA PENGGANTI**

- 1. Mardian Wibowo
- 2. Rahmadiani Putri Nilasari
- 3. Hersinta Setiarini

### Pihak yang Hadir:

### A. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 39/PHPU.BUP-XXIII/2025:

- 1. Susi Tur Andayani
- 2. Zainal Rachman

### B. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 151/PHPU.BUP-XXIII/2025:

- 1. Adi Mansar
- 2. Guntur Rambe

### C. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 152/PHPU.BUP-XXIII/2025:

- 1. Sofyan Syahputra
- 2. Paujiah Hanum

## D. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 169/PHPU.WAKO-XXIII/2025:

- 1. Erik Setiawan
- 2. Abdul Hakim

#### E. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 257/PHPU.GUB-XXIII/2025:

- 1. Donal Fariz
- 2. Amnasmen

#### F. Termohon:

1. Upi Hastati (KPU Prov. Sulawesi Selatan)

2. Samingan (KPU Kab. Mesuji)

Wahid Pasaribu
 Abdul Haris Nasution
 Relis Yanthy Panjaitan
 (KPU Kab. Tapanuli Tengah)
 (KPU Kab. Deli Serdang)

6. Mawardi (KPU Kota Batam)

#### **G. Kuasa Hukum Termohon:**

- 1. Frans Handrajadi
- 2. Fajar Maulana Yusuf
- 3. Anjar Nawan Yusky Eko Prasetyo
- 4. Ulfadrian Mandalani

## H. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 39/PHPU.BUP-XXIII/2025:

- 1. Aida Mardatillah
- 2. M. Ridho

### I. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 151/PHPU.BUP-XXIII/2025:

- 1. Masinton Pasaribu
- 2. Arteria Dahlan

## J. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 152/PHPU.BUP-XXIII/2025:

- 1. Doni Hendra Lubis
- 2. Ahmad Sofyan Hussein Rambe

### K. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 169/PHPU.WAKO-XXIII/2025:

- 1. Harimuddin
- 2. Raka Gani Pissani

## L. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 257/PHPU.GUB-XXIII/2025:

- 1. Anwar
- 2. Murlianto

#### M. Bawaslu:

1. Totok Hariyono (Bawaslu RI)

Romson Poskoro Purba
 Mardiana Rusli
 Andarias Duma
 (Bawaslu Prov. Sulawesi Selatan)
 (Bawaslu Prov. Sulawesi Selatan)

5. Deden Cahyono (Bawaslu Kab. Mesuji)6. Wahyu Eko Prasetiyo (Bawaslu Kab. Mesuji)

Setia Wati Simanjuntak (Bawaslu Kab. Tapanuli Tengah)
 Febryandi Ginting (Bawaslu Kab. Deli Serdang)

#### \*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

- ...: tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).
- (...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

#### **SIDANG DIBUKA PUKUL 12.55 WIB**

### 1. KETUA: SALDI ISRA [00:00]

Kita mulai semua, ya.

Sidang untuk Perkara Nomor 39, 169, 151, 152, 257, PHPU Bupati, Wali Kota, Gubernur Tahun 2025 dibuka, persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

#### **KETUK PALU 3X**

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu.

Silakan, sekarang memperkenalkan diri Kuasa untuk Permohonan Nomor 39, Pemohon. Enggak ada mik nya ini, Pak, ... apa ... satu aja berdiri, Bu, enggak usah dua-dua, Bu. Nah.

# 2. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR PERKARA 39/PHPU.BUP-XXIII/2025: ZAINAL RACHMAN [00:57]

Baik, Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, kami dari perkar ... Perkara 39, izin memperkenalkan diri ... diri, saya sendiri Zainal Rachman, kemudian rekan saya Susi Tur Andayani.

Terima kasih, Yang Mulia.

#### 3. KETUA: SALDI ISRA [01:10]

Terima kasih.

Perkara 169, untuk Kota Batam, silakan.

### 4. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR PERKARA 169/PHPU.WAKO-XXIII/2025: ABDUL HAKIM [01:23]

Assalamualaikum wr. wb.

Izin, Yang Mulia. Kami Tim Hukum dari Calon Wali Kota Pak Nuryanto sama Hardi Selamat Hood. Di samping saya ada rekan saya Mas Erik dan saya sendiri Abdul Hakim, terima kasih.

#### 5. KETUA: SALDI ISRA [01:39]

Terima kasih.

Untuk Perkara 151, Kabupaten Tapanuli Tengah?

### 6. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR PERKARA 151/PHPU.BUP-XXIII/2025: ADI MANSAR [01:47]

Assalamualaikum wr. wb.

### 7. KETUA: SALDI ISRA [01:49]

Waalaikumsalam.

### 8. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR PERKARA 151/PHPU.BUP-XXIII/2025: ADI MANSAR [01:47]

Kenalkan, Yang Mulia. Kami Kuasa Hukum Pemohon Paslon Nomor 1, yang hadir hari ini, Adi Mansar dan Guntur Rambe. Terima kasih, Yang Mulia.

### 9. KETUA: SALDI ISRA [01:58]

Terima kasih. Untuk Perkara 152, Kabupaten Deli Serdang?

## 10. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR PERKARA 152/PHPU.BUP-XXIII/2025: PAUJIAH HANUM [02:06]

Assalamualaikum wr. wb.

### 11. KETUA: SALDI ISRA [02:08]

Waalaikumsalam.

# 12. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR PERKARA 152/PHPU.BUP-XXIII/2025: PAUJIAH HANUM [02:09]

Terima kasih, Yang Mulia. Perkenalkan, kami dari Kuasa Hukum Perkara 152. Yang hadir hari ini, saya sendiri Paujiah Hanum dan rekan saya Sofyan Syahputra.

Terima kasih, Yang Mulia.

#### 13. KETUA: SALDI ISRA [02:19]

Terima kasih.

Perkara 257, untuk Gubernur Sulawesi Selatan?

### 14. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR PERKARA 257/PHPU.GUB-XXIII/2025: DONAL FARIZ [02:25]

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr.wb.

### 15. KETUA: SALDI ISRA [02:28]

Waalaikumsalam.

# 16. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR PERKARA 257/PHPU.GUB-XXIII/2025: DONAL FARIZ [02:29]

Hadir Kuasa Pemohon Perkara 257, saya Donal Fariz dan sebelah kanan, Amnasmen.

Terima kasih, Yang Mulia.

### 17. KETUA: SALDI ISRA [02:35]

Terima kasih.

Sekarang Termohon untuk Perkara 39, silakan. Ya, itu miknya mbak, biar suaranya kedengeran.

### 18. KUASA HUKUM TERMOHON: FRANS HANDRAJADI [02:49]

Izin, Yang Mulia.

Saya Termohon Perkara 39, nama Frans Handrajadi dan didampingi oleh Prinsipal Samingan, Ketua KPU Kabupaten Mesuji. Terima kasih.

#### 19. KETUA: SALDI ISRA [03:00]

Terima kasih. 169, Kota Batam?

## 20. KUASA HUKUM TERMOHON: ANJAR NAWAN YUSKY EKO PRASETYO [03:05]

Assalamualaikum wr. wb.

Izin, Yang Mulia. Kami Kuasa Hukum Termohon KPU Kota Batam Perkara 169, dari Kantor Bahta Hafif dan Ali[sic!], yang hadir hari ini saya sendiri Anjar Nawan Yusky. Hadir juga bersama saya, di sebelah saya, Prinsipal Ketua KPU Kota Batam Bapak Mawardi, S.E.

Terima kasih, Yang Mulia.

### 21. KETUA: SALDI ISRA [03:28]

Terima kasih. Untuk 151, Termohon Kabupaten Tapanuli Tengah?

### 22. KUASA HUKUM TERMOHON: WAHID PASARIBU [03:39]

Assalamualaikum wr. wb.

### 23. KETUA: SALDI ISRA [03:42]

Waalaikumsalam.

### 24. KUASA HUKUM TERMOHON: WAHID PASARIBU [03:43]

Selamat Siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami memperkenalkan diri, Yang Mulia, dengan Prinsipal, yaitu Wahid Pasaribu sebagai Ketua KPU Tapanuli Tengah dan juga didampingi rekan saya Divisi Hukum Abdul Haris Nasution.

Terima kasih.

### 25. KETUA: SALDI ISRA [04:00]

Tidak pakai Kuasa Hukum, ya?

#### 26. KUASA HUKUM TERMOHON: WAHID PASARIBU [04:01]

Belum, Yang Mulia.

#### 27. KETUA: SALDI ISRA [04:04]

Oke. Berikut 152.

#### 28. KUASA HUKUM TERMOHON: FAJAR MAULANA YUSUF [04:09]

Assalamualaikum wr.wb.

#### 29. KETUA: SALDI ISRA [04:09]

Waalaikumsalam.

### 30. KUASA HUKUM TERMOHON: FAJAR MAULANA YUSUF [04:12]

Izin, untuk memperkenalkan diri. Kuas ... hadir Kuasanya bersama saya Fajar Maulana Yusuf dari HD[sic!] Law Office bersama Ketua Kabupaten KPU Deli Serdang, Ibu Relis Yanthy Panjaitan. Terima kasih.

### 31. KETUA: SALDI ISRA [04:29]

Terima kasih. Ini past ... masih ada PSDS enggak di situ, Bu? Masih, ya? Ibu enggak tau kan, PSDS? Persatuan Sepak Bola Deli Serdang, Bu. Itu salah satu lawan tangguhnya Semen Padang dulu ketika masih aktif di divisi utama.

Berikut, 257.

### 32. KUASA HUKUM TERMOHON: ULFADRIAN MANDALANI [04:52]

Bismillahirrahmaanirrahiim. Assalamualaikum wr. wb.

Mohon izin, Yang Mulia. Kami di sini mendampingi Divisi Hukum KPU Sulawesi Selatan. Kami dari Jaksa Pengacara Negara, Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan, saya Ulfadrian Mandalani. Selanjutnya kami akan bekerja sama dengan Kantor Firma Hukum Hicon, Yang Mulia.

### 33. KETUA: SALDI ISRA [05:15]

Oke. Jadi, ini sudah ada Prinsipal?

#### 34. KUASA HUKUM TERMOHON: ULFADRIAN MANDALANI [05:19]

Siap.

#### 35. KETUA: SALDI ISRA [05:19]

Ada Jaksa Pengacara Negara?

#### 36. KUASA HUKUM TERMOHON: ULFADRIAN MANDALANI [05:19]

Siap.

#### 37. KETUA: SALDI ISRA [05:19]

Ada lagi kantor hukum, ya?

#### 38. KUASA HUKUM TERMOHON: ULFADRIAN MANDALANI [05:25]

Siap.

### 39. KETUA: SALDI ISRA [05:26]

Wah, serius banget ini persiapannya.

### 40. KUASA HUKUM TERMOHON: ULFADRIAN MANDALANI [05:27]

Siap.

### 41. KETUA: SALDI ISRA [05:29]

Oke, terima kasih.

### 42. KUASA HUKUM TERMOHON: ULFADRIAN MANDALANI [05:29]

Terima kasih, Yang Mulia.

### 43. KETUA: SALDI ISRA [05:31]

Sekarang Pihak Terkait untuk Perkara 39.

## 44. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 39/PHPU.BUP-XXIII/2025: AIDA MARDATILLAH [05:36]

Assalamualaikum wr. wb.

Perkenalkan kami dari Pihak Terkait Perkara 39 yang tergabung dalam DPP Bahu NasDem, dengan saya yang hadir Aida Mardatillah dan rekan saya M. Ridho.

Terima kasih, Yang Mulia.

#### 45. KETUA: SALDI ISRA [05:50]

Terima kasih. 169, Pihak Terkait.

# 46. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 169/PHPU.WAKO-XXIII/2025: HARIMUDDIN [05:53]

Bismillahirrahmanirrahiim. Assalamualaikum wr. wb.

Kami Kuasa Hukum Perkara 169, Pihak Terkait yang hadir Harimuddin, bersama rekan saya Raka Gani Pissani.

Terima kasih, Yang Mulia.

Assalamualaikum wr. wb.

### 47. KETUA: SALDI ISRA [06:08]

Waalaikumsalam. 151, Tapanuli Tengah.

## 48. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 151/PHPU.BUP-XXIII/2025: ARTERIA DAHLAN [06:12]

Assalamualaikum wr. wb.

Izin perkenalkan diri, Yang Mulia. Kami Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara 151, hadir Arteria Dahlan bersama Prinsipal kami, langsung Bupati terpilih, Pak Masinton Pasaribu, Yang Mulia.

### 49. KETUA: SALDI ISRA [06:26]

Terima kasih. Saya kira yang sebelahnya Kuasa Hukum juga tadi, tapi enggak ada. Jadi supaya suasananya agak lebih santai, ya begitu. Ini kan ... apa namanya ... kalau tegang-tegang terus, agak repot kita. Untuk Perkara 152.

## 50. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 152/PHPU.BUP-XXIII/2025: DONI HENDRA LUBIS [06:43]

Assalamualaikum wr. wb.

Kami dari Kuasa Hukum Pihak Terkait Dr. Asri Ludin Tambunan dan Lom Lom Suwondo, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deli Serdang Nomor Urut 02. Dalam hal ini, yang hadir saya sendiri Doni Hendra Lubis. Di sebelah kiri saya, Ahmad Sofyan Hussein Rambe.

Sekian, Yang Mulia.

#### 51. KETUA: SALDI ISRA [07:06]

Terima kasih. Tadi siapa yang ngomong?

## 52. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 152/PHPU.BUP-XXIII/2025: DONI HENDRA LUBIS [07:08]

Doni Hendra Lubis, Yang Mulia.

#### 53. KETUA: SALDI ISRA [07:09]

Ya, ini dulu ketika SD orang belajar huruf R dia pergi. Sekarang masih lupa.

## 54. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 152/PHPU.BUP-XXIII/2025: DONI HENDRA LUBIS [07:14]

Siap, Yang Mulia.

### 55. KETUA: SALDI ISRA [07:17]

Hanya kelakar saja. Oke, Kuasa Pihak Terkait 257.

# 56. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 257/PHPU.GUB-XXIII/2025: ANWAR [07:23]

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Kami Kuasa Pihak Terkait 257, yang sempat hadir. Saya sendiri Anwar dan rekan saya Murlianto. Terima kasih, Yang Mulia.

### 57. KETUA: SALDI ISRA [07:36]

Terima kasih. Jadi ini semua hadir, lengkap ini. Dari Bawaslu, silakan!

### 58. BAWASLU: TOTOK HARIYONO [07:44]

Mohon izin, Yang Mulia.

Terima kasih, mohon maaf. Kami, Bawaslu RI Totok Hariyono, mendampingi dari Sumut, Romson Poskoro Purba; Ferdi Ali Garing[sic!], Bawaslu Kabupaten Kendari[sic!] ... Ser ... Deli Serdang; Satu Walji[sic!], Kabupaten Tapanuli Tengah; Satu ... Setiow ... Setia Wati, Tapanuli Tengah; Deden Cahyono, Bawaslu Mesuji; Wahyu Eko Prasetyo, Bawaslu Mesuji. Dari Suma ... Sulawesi Selatan, Mardiana Rusli dan Andarias Duma.

Terima kasih, Yang Mulia, mohon maaf.

#### 59. KETUA: SALDI ISRA [08:33]

Terima kasih. Sama-sama, Mas ... Pak Totok. Telat-telat sedikit sih, enggak apa-apa lah, kita bisa maklum.

#### 60. BAWASLU: TOTOK HARIYONO [08:38]

Mohon maaf, Yang Mulia.

### 61. KETUA: SALDI ISRA [08:39]

Beliau tadi jadi Imam di Masjidnya Mahkamah Konstitusi, makanya agak telat sedikit.

Terima kasih, siang ini agenda persidangan kita adalah untuk mendengarkan penjelasan Pokok-Pokok Permohonan dari Pemohon. Namun demikian, perlu kami tegaskan beberapa hal. Ini waktunya Pemohon, yang lain-lain nanti akan ada gilirannya. Jadi, kita tidak ganggu mereka ini menyampaikan Pokok-Pokok Permohonan dan masing-masing Permohonan tidak dibedakan apakah itu Bupati, Wali Kota, atau Gubernur, diberi waktu maksimal 15 menit. Nah, itu tolong diatur waktu 15 menit. Dan yang ketiga, hanya menyampaikan apa yang ada dalam Permohonan perbaikan. Jadi yang disampaikan ... yang sudah disampaikan ke Mahkamah tidak boleh lagi ditambah, dikurangi, sebab itulah nanti yang akan dijawab oleh Termohon, yang akan direspons Pihak Terkait, termasuk yang akan dijawab oleh ... atau akan diterangkan oleh Bawaslu.

Nah itu, jadi jangan nanti dikarang lagi yang lain-lain, kami tidak bisa mengikutinya dan nanti bisa jadi persoalan dalam proses pembuktian.

Yang keempat, kalau ada yang mau menyerahkan bukti atau bukti tambahan, terutama bagi Pemohon, karena Pemohon yang memasukkan lebih awal, bukti tambahan itu bisa diserahkan sekarang atau sampai nanti menjelang persidangan berikutnya ketika Termohon, Pihak Terkait dan Bawaslu akan memberikan keterangan. Apa maksudnya? Agar kami bisa melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti yang disampaikan. Jadi jangan ditunggu sidang mau selesai, pada sidang berikutnya baru diserahkan, nah itu agak repot memverifikasinya. Itu yang keempat.

Yang kelima, optimalkan bukti di fase awal ini, baik Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, maupun Bawaslu. Kalau Bawaslu kan, ya mereka posisinya kan akan netral. Mengapa perlu dipesankan ini? Jangan lalu semua kita berpikir ini akan lanjut semuanya ke pembuk ... pembuktian tahap berikutnya. Karena ada ... ada ... ada fase penilaian dulu, baru bisa nanti akan ... ini bisa diteruskan atau tidak, itu tergantung penilaian Mahkamah.

Oleh karena itu, semua bukti yang mungkin, itu segera dipersiapkan, sodorkan kepada kami bukti dan kami akan menilai bukti-bukti itu.

Jadi, ini berdasarkan bukti karena kasus konkret, tidak bisa diopini-opinikan, tidak bisa ... apa namanya ... dilogika-logikakan ini. Jadi berbasis kepada bukti, nah itu yang ... yang mesti diingatkan. Dan bukti-bukti itu sesuai dengan jenisnya mesti dikasih ... apa istilahnya? Pak Donal, apa istilahnya itu? Leges, semakin banyak bukti semakin baik, karena semakin banyak legesnya, semakin banyak sumbangan kita kepada negara.

Oke ya, jadi itu clear semuanya dan tolong ini menjadi perhatian kita bersama.

Kesempatan pertama kita berikan kepada Pemohon atau kuasa untuk Nomor Perkara 39, dipersilakan.

### 62. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 39/PHPU.BUP-XXIII/2025: ZAINAL RACHMAN [12:30]

Baik, Terima kasih.

Yang Mulia Hakim Majelis Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

### 63. KETUA: SALDI ISRA [12:45]

Majelisnya dulu, baru Hakimnya begitu.

### 64. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 39/PHPU.BUP-XXIII/2025: ZAINAL RACHMAN [12:46]

Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Saudara Termohon, Saudara Pihak Terkait.

Pada prinsipnya kami menyampaikan Permohonan ini untuk seluruhnya dan kami bacakan pada pokok-pokoknya saja, Yang Mulia.

#### 65. KETUA: SALDI ISRA [12:59]

Silakan!

## 66. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 39/PHPU.BUP-XXIII/2025: ZAINAL RACHMAN [13:02]

Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Mesuji, Provinsi Lampung Nomor 1800 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil bupati Kabupaten Mesuji Tahun 2024, tanggal 3 Desember 2024.

Nama, H. Suprapto, S.Psi., M.H. dan Fuad Amrullah, S.E.

Keduanya adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung Tahun 2024. Nomor Urut 4 berdasarkan Surat Kuasa khusus tanggal 5 Desember 2024. Dalam hal ini memberi kuasa kepada:

- 1. Raden Ananto Pratomo
- 2. (...)

### 67. KETUA: SALDI ISRA [13:46]

Enggak usah dibacakan itu (...)

## 68. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 39/PHPU.BUP-XXIII/2025: ZAINAL RACHMAN [13:46]

Ya.

#### 69. KETUA: SALDI ISRA [13:46]

Habis-habis waktu saja kalau itunya, substansinya penting (...)

## 70. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 39/PHPU.BUP-XXIII/2025: ZAINAL RACHMAN [13:47]

Selanjutnya, disebut sebagai Pihak Pemohon (...)

### 71. KETUA: SALDI ISRA [13:47]

Ya.

# 72. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 39/PHPU.BUP-XXIII/2025: ZAINAL RACHMAN [13:48]

Terhadap Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Mesuji, Provinsi Lampung berkedudukan di (...)

### 73. KETUA: SALDI ISRA [13:54]

Oke, enggak perlu kedudukannya. Terus?

# 74. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 39/PHPU.BUP-XXIII/2025: ZAINAL RACHMAN [13:57]

Dianggap dibacakan.

- I. Pengantar Pemohon dianggap dibacakan.
- II. Kewenangan Mahkamah dianggap dibacakan.
- III. Kedudukan Hukum Pemohon dianggap dibacakan.
- IV. Tenggang Waktu dianggap dibacakan.
- V. Pokok Permohonan.

Bahwa sehubungan pemilihan Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Mesuji 2024, Termohon telah menerbitkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Mesuji, Provinsi Lampung Nomor 1800 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mesuji Tahun 2024 tanggal 3 Desember 2024.

Bahwa dalam keputusan sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Mesuji, Provinsi Lampung Nomor 1800 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mesuji Tahun 2024 tanggal 3 Desember 2024, Termohon menetapkan perolehan masing-masing pasangan calon sebagai berikut.

Dianggap dibacakan.

### 75. KETUA: SALDI ISRA [14:58]

Ya.

## 76. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 39/PHPU.BUP-XXIII/2025: ZAINAL RACHMAN [15:03]

Bahwa jika Pilbup Mesuji dilaksanakan sesuai prinsip yang Luber dan Jurdil, maka Paslon Nomor Urut 2 bukan hanya tidak akan memperoleh suara sebagaimana dalam penetapan.

Bahwa seharusnya dibatalkan, didiskualifikasi, sebagaimana pasangan calon. Soal mengapa Paslon Nomor Urut 2 harus diskualifikasi, akan kami jelaskan lebih lanjut pada bagian ... lain ... pada bagian lain dari Permohonan ini.

- 5. Bahwa dengan didiskualifikasinya Pasangan Calon Nomor Urut 2, maka perolehan suara Pilbub Mesuji ditetapkan oleh Termohon seharusnya menjadi sebagai berikut. 1) Syamsudin S.Sos., dianggap dibacakan dan seterusnya.
- 5 ... 6. Bahwa Pemohon berkeyakinan Pasangan Nomor Urut 2 harus dibatalkan dan seterusnya.
- 7. Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi yang menihilkan perolehan suara pasangan calon pernah dilakukan putu ... Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 101/PHP.BUP-XIV/2020 ... 2016 tentang Sengketa Hasil Pemilihan Bupati/Wakil Bupati Teluk Bintuni Tahun 2015.
- 8. Bahwa Termohon tidak melaksanakan verifikasi terhadap Bakal Calon Bupati Mesuji secara benar dan seterusnya.
- 9. Bahwa Termohon tidak melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan (...)

### 77. KETUA: SALDI ISRA [16:25]

Tolong ... tolong poin yang itu dijelaskan, agak lebih dijelaskan.

## 78. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR PERKARA 39/PHPU.BUP-XXIII/2025: ZAINAL RACHMAN [16:28]

Baik, Yang Mulia.

### 79. KETUA: SALDI ISRA [16:30]

Karena itu kan di angka 7, ya? Halaman 8.

### 80. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR PERKARA 39/PHPU.BUP-XXIII/2025: ZAINAL RACHMAN [16:34]

Baik, Yang Mulia.

8. Bahwa Termohon tidak melaksanakan verifikasi terhadap Bakal Calon Bupati Mesuji secara benar. Hal ini dibuktikan pada Paslon Nomor Urut 2, Hj. Elfianah, S.E., telah melakukan manipulasi identitas diri untuk memperlancar pencalonannya.

Hal ini dapat dibuktikan bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Perkara Pidana Nomor 774K/Pid.sus/2013, Tanggal 11 November 2014. Dimana dalam Putusan Mahkamah Agung tersebut, tertulis nama Hj. Elfianah binti Birta, terpidana, dimaksud adalah Hj. Elfianah.

### 81. KETUA: SALDI ISRA [17:17]

Oke. Pertanyaan saya sebelum dilanjutkan, itu pidananya, apa? Pidsusnya, apa? Halo?

### 82. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR PERKARA 39/PHPU.BUP-XXIII/2025: ZAINAL RACHMAN [17:27]

Izin, Yang Mulia.

# 83. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR PERKARA 39/PHPU.BUP-XXIII/2025: ZAINAL RACHMAN [17:28]

Apa, Pidsusnya?

## 84. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR PERKARA 39/PHPU.BUP-XXIII/2025: ZAINAL RACHMAN [17:29]

Penggelapan pupuk, Yang Mulia.

#### 85. KETUA: SALDI ISRA [17:30]

Penggelapan hukum?

## 86. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR PERKARA 39/PHPU.BUP-XXIII/2025: ZAINAL RACHMAN [17:31]

Pupuk.

### 87. KETUA: SALDI ISRA [17:32]

Penggelapan pupuk. Itu apa jenis tindak pidananya? Penggelapan?

### 88. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR PERKARA 39/PHPU.BUP-XXIII/2025: ZAINAL RACHMAN [17:36]

Penggelapan, Yang Mulia.

### 89. KETUA: SALDI ISRA [17:39]

Penggelapan itu, masuk tindak pidana khusus?

## 90. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR PERKARA 39/PHPU.BUP-XXIII/2025: ZAINAL RACHMAN [17:45]

Izin, Yang Mulia, koordinasi sebentar.

#### 91. KETUA: SALDI ISRA [17:49]

Ini kalau lawyer itu, harus paham lho, apa yang ditulis.

# 92. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR PERKARA 39/PHPU.BUP-XXIII/2025: ZAINAL RACHMAN [17:52]

Baik. Siap, Yang Mulia.

#### 93. KETUA: SALDI ISRA [17:53]

Ya. Itu dihukum, berapa tahun? Daripada Anda nanya, suruh yang ngomong itulah, suruh yang sumber Anda itu, ngomong.

### 94. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR PERKARA 39/PHPU.BUP-XXIII/2025: ZAINAL RACHMAN [18:06]

Izin, Yang Mulia. Masih dicari ininya, Yang Mulia.

### 95. KETUA: SALDI ISRA [18:09]

Gimana ini? Sudah ... barang sudah dibawa ke permukaan, masih mau dicari.

### 96. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR PERKARA 39/PHPU.BUP-XXIII/2025: ZAINAL RACHMAN [18:21]

Izin, Yang Mulia. Membacakan.

### 97. KETUA: SALDI ISRA [18:23]

Silakan.

## 98. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR PERKARA 39/PHPU.BUP-XXIII/2025: ZAINAL RACHMAN [18:24]

Menyatakan terdakwa Hj. Elfianah binti Birta, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menjual dan menyalurkan pupuk bersubsidi di luar wilayah tanggung jawabnya.

#### 99. KETUA: SALDI ISRA [18:36]

Oke.

# 100. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR PERKARA 39/PHPU.BUP-XXIII/2025: ZAINAL RACHMAN [18:36]

Dua (...)

#### 101. KETUA: SALDI ISRA [18:37]

Dihukum, berapa? Oke, yang saya tanya saja yang jawab. Biar kita uji juga kemampuan para lawyer nih, ja ... asal jangan terima perkara saja.

# 102. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR PERKARA 39/PHPU.BUP-XXIII/2025: ZAINAL RACHMAN [18:58]

Izin, Yang Mulia.

Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Hj. Elfianah binti Birta. Oleh karena itu, dengan pidana penjara tiga bulan.

### 103. KETUA: SALDI ISRA [18:05]

Tiga bulan, ya?

## 104. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR PERKARA 39/PHPU.BUP-XXIII/2025: ZAINAL RACHMAN [19:07]

Baik, Yang Mulia.

# 105. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR PERKARA 39/PHPU.BUP-XXIII/2025: ZAINAL RACHMAN [19:08]

Itu ancaman hukumannya, berapa? Beda, kan? Pidana yang dijatuhkan, dengan ancaman hukuman, bisa membedakannya?

# 106. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR PERKARA 39/PHPU.BUP-XXIII/2025: ZAINAL RACHMAN [19:17]

Baik, Yang Mulia.

### 107. KETUA: SALDI ISRA [19:19]

Berapa ancaman hukumannya, itu?

# 108. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR PERKARA 39/PHPU.BUP-XXIII/2025: ZAINAL RACHMAN [19:24]

Izin, Yang Mulia. Untuk di berkas, kami belum ketemu (ucapan tidak terdengar dengan jelas), izin.

#### 109. KETUA: SALDI ISRA [19:27]

Oke, lanjut. Ya, Silakan.

# 110. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR PERKARA 39/PHPU.BUP-XXIII/2025: ZAINAL RACHMAN [19:32]

Izin, Yang Mulia. Kami melanjutkan (...)

#### 111. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [19:32]

Sebentar, sebentar.

# 112. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR PERKARA 39/PHPU.BUP-XXIII/2025: ZAINAL RACHMAN [19:33]

Ya, baik.

### 113. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [19:34]

Itu lawyer, harus correct, ya? Itu dijatuhi hukuman pidana tiga bulan, tapi masa percobaan, ya. Itu dengan masa percobaan selama enam bulan.

Jadi harus ... harus pas, itu saja.

### 114. KETUA: SALDI ISRA [19:51]

Oke, lanjut.

### 115. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR PERKARA 39/PHPU.BUP-XXIII/2025: ZAINAL RACHMAN [19:53]

Baik. Izin, Yang Mulia, melanjutkan.

### 116. KETUA: SALDI ISRA [19:54]

Ya.

# 117. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR PERKARA 39/PHPU.BUP-XXIII/2025: ZAINAL RACHMAN [19:54]

Poin 9. Bahwa Termohon tidak melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan. Hal ini dapat dibuktikan, Termohon telah melakukan pembiaran pada saat hari tenang, dan seterusnya.

#### 118. KETUA: SALDI ISRA [20:06]

Oke.

### 119. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 39/PHPU.BUP-XXIII/2025: ZAINAL RACHMAN [20:07]

10. Bahwa Termohon telah melakukan pelanggaran pemilu, hal ini dapat dibuktikan di TPS Tanjung Sari, sebelumnya dilakukan pencoblosan KPPS memerintahkan kepada seluruh saksi dan seluruh petugas TPS untuk menandatangani formil ... Formulir C-1, dan seterusnya.

### 120. KETUA: SALDI ISRA [20:23]

Itu poin berapa yang dibacakan?

## 121. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 39/PHPU.BUP-XXIII/2025: ZAINAL RACHMAN [20:25]

Poin 10, Yang Mulia.

### 122. KETUA: SALDI ISRA [20:26]

10. Halaman?

### 123. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 39/PHPU.BUP-XXIII/2025: ZAINAL RACHMAN [20:27]

Halaman 6, Yang Mulia.

### 124. KETUA: SALDI ISRA [20:28]

Melakukan kecurangan, ya, oke.

# 125. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 39/PHPU.BUP-XXIII/2025: ZAINAL RACHMAN [20:31]

Ya. Melanjutkan, Yang Mulia.

#### 126. KETUA: SALDI ISRA [20:32]

Ya.

### 127. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 39/PHPU.BUP-XXIII/2025: ZAINAL RACHMAN [20:33]

- 11. Bahwa Termohon telah melakukan kecurangan dengan memihak Paslon Nomor Urut 2, hal ini dapat dibuktikan di TPS 2 Gedung Mulia, PPS mengambil kertas suara atas nama Sugianto dan mencoblosnya, namun karena keburu ketahuan, maka PPS tersebut menghentikan aksinya.
- 12. Bahwa Termohon tidak menjalankan tugasnya sebagai penyelenggara pemilu dengan baik, hal ini dapat dibuktikan pada pemilih yang tinggal di wilayah register, di mana TPS-nya ditetapkan di wilayah yang dekat dari wilayah register, tetapi petugas PPS mengantarkan undangan dalam waktu yang sempit, yakni malam hari menjelang

pencoblosan, sehingga 40 mata pilih tidak berangkat ke TPS dan tidak memberikan suaranya.

13. (...)

### 128. KETUA: SALDI ISRA [21:19]

Ini 40 mata pilih ini apa maksudnya, nih?

### 129. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 39/PHPU.BUP-XXIII/2025: ZAINAL RACHMAN [21:23]

Tidak berangkat, Yang Mulia, karena ... apa (...)

### 130. KETUA: SALDI ISRA [21:26]

Bukan 40 mata pilih tidak berangkat, 40 pasang mata atau apa ini?

# 131. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 39/PHPU.BUP-XXIII/2025: ZAINAL RACHMAN [21:31]

Ya, 40 mata pilih, artinya 40 pasang mata, Yang Mulia.

### 132. KETUA: SALDI ISRA [21:37]

40 pasang mata, ya?

# 133. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 39/PHPU.BUP-XXIII/2025: ZAINAL RACHMAN [21:37]

Ya. 40 orang, Yang Mulia.

#### 134. KETUA: SALDI ISRA [21:39]

40 orang.

### 135. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 39/PHPU.BUP-XXIII/2025: ZAINAL RACHMAN [21:40]

Ya, Yang Mulia.

#### 136. KETUA: SALDI ISRA [21:41]

Ya. Anda ini pilih bahasanya, jadi pusing kita mau lihat.

### 137. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 39/PHPU.BUP-XXIII/2025: ZAINAL RACHMAN [21:42]

Ya.

### 138. KETUA: SALDI ISRA [21:44]

Silakan!

## 139. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 39/PHPU.BUP-XXIII/2025: ZAINAL RACHMAN [21:45]

Sesuai dengan di Permohonan, Yang Mulia. Izin melanjutkan, Yang Mulia.

### 140. KETUA: SALDI ISRA [21:46]

Ya.

## 141. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 39/PHPU.BUP-XXIII/2025: ZAINAL RACHMAN [21:47]

13. Bahwa Termohon telah melakukan kecurangan yang melakukan penambahan DPTb, di beberapa TPS melebihi peraturan, yakni Termohon melakukan DPT ... melakukan DPTb melebihi 2,5% dari DPT.

#### 142. KETUA: SALDI ISRA [21:59]

Oke.

### 143. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 39/PHPU.BUP-XXIII/2025: ZAINAL RACHMAN [22:00]

14. Bahwa Termohon membiarkan Calon Bupati Nomor Urut 2, yang notabene sebelumnya pernah menjadi Ketua DPR Kabupaten Mesuji, telah melakukan kecurangan secara masif dengan melibatkan kepala desa, antara lain, Kepala Desa Tanjung Rejo, membuat voice note di WA Grup, yang isinya mengajak memilih Paslon Nomor Urut 2, dan menginstruksikan kepada semua RK (Rukun Kampung) untuk menyebarkan voice note tersebut ke semua grup WA.

#### 144. KETUA: SALDI ISRA [22:26]

Ini voice note siapa? Voice note Anggota KPU?

### 145. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 39/PHPU.BUP-XXIII/2025: ZAINAL RACHMAN [22:30]

Ini, Yang Mulia.

### 146. KETUA: SALDI ISRA [22:32]

Bukan, voice note-nya ini voice note siapa? Ini suara siapa yang mengajak itu?

## 147. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 39/PHPU.BUP-XXIII/2025: ZAINAL RACHMAN [22:38]

Kepala desa, Yang Mulia.

### 148. KETUA: SALDI ISRA [22:39]

Kepala desa, ya?

### 149. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 39/PHPU.BUP-XXIII/2025: ZAINAL RACHMAN [22:40]

Kepala desa.

#### 150. KETUA: SALDI ISRA [22:41]

Tahu nama kepala desanya?

### 151. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 39/PHPU.BUP-XXIII/2025: ZAINAL RACHMAN [22:44]

Ada di data alat bukti kami, Yang Mulia.

#### 152. KETUA: SALDI ISRA [22:46]

Ya, gimana saya melihatnya itu? Ada tahu enggak kepala desanya siapa, desa apa saja? Ada?

## 153. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 39/PHPU.BUP-XXIII/2025: ZAINAL RACHMAN [22:52]

Ya, kalau Kepala Desanya itu, Desa Tanjung Rejo.

### 154. KETUA: SALDI ISRA [22:54]

Ya.

### 155. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 39/PHPU.BUP-XXIII/2025: ZAINAL RACHMAN [22:55]

Membuat voice note di grup WA, yang isinya mengajak (...)

#### 156. KETUA: SALDI ISRA [22:59]

Oke.

# 157. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 39/PHPU.BUP-XXIII/2025: ZAINAL RACHMAN [23:00]

Memilih Pasangan Nomor Urut 2.

### 158. KETUA: SALDI ISRA [23:01]

Oke.

# 159. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 39/PHPU.BUP-XXIII/2025: ZAINAL RACHMAN [23:02]

Dan menginstruksikan kepada semua RK (Rukun Kampung) untuk menyebarkan voice note tersebut ke semua grup WA.

#### 160. KETUA: SALDI ISRA [23:07]

Oke, lanjut!

# 161. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 39/PHPU.BUP-XXIII/2025: ZAINAL RACHMAN [23:09]

15. Bahwa selain itu, Termohon melakukan pembiaran Pasangan Nomor Urut 2, menggerakkan secara masif kepala desa, yang cara sering ... yang cara sering mengadakan kumpul-kumpul dengan para kepala desa, mempengaruhi untuk mendukung, dan memilih pasangan Paslon Nomor Urut 2, sehingga pada malam setelah penghitungan quick count kepala desa ... kepala ... kepala desa, berdatangan kumpul di rumah kediaman Calon Bupati Nomor Urut 2.

#### 162. KETUA: SALDI ISRA [23:42]

Oke.

## 163. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 39/PHPU.BUP-XXIII/2025: ZAINAL RACHMAN [23:45]

Dengan menyebut Rumdis Ketua Calon Bupati Nomor Urut 2.

### 164. KETUA: SALDI ISRA [23:49]

Oke. Lanjut!

## 165. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 39/PHPU.BUP-XXIII/2025: ZAINAL RACHMAN [23:50]

16. Bahwa Termohon juga membiarkan Calon Bupati Nomor ... ulangi ... 16. Bahwa Termohon juga membiarkan Calon Bupati Nomor Urut 2 melakukan pembohongan publik, yang di dalam kampanyenya yakni Calon Bupati Nomor Urut 2 dalam kampanyenya menyatakan, "Di dalam hadisnya, Nabi Muhammad menyatakan: bagi masyarakat yang memilih Paslon Nomor Urut 2, maka akan masuk surga bersama saya (Nabi Muhammad)." Hal ini membutik ... membuktikan Calon Bupati Nomor Urut 2 mengada-ada dan melakukan tindakan penistaan agama. Oleh karena tindakan ... ol ... ulangi, oleh karena tidak ada hadis yang menyatakan demikian.

Tujuh belas. Bahwa Termohon membiarkan Calon Bupati Nomor Urut 2 yang pernah menjabat sebagai Ketua DBR[sic!] telah menggunakan fasilitas negara, yakni memberikan kartu BPJS gratis kepada calon pemilih pada saat melaksanakan kampanye.

#### 166. KETUA: SALDI ISRA [24:48]

Oke.

## 167. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 39/PHPU.BUP-XXIII/2025: ZAINAL RACHMAN [24:49]

Petitum.

#### 168. KETUA: SALDI ISRA [24:50]

Silakan.

### 169. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 39/PHPU.BUP-XXIII/2025: ZAINAL RACHMAN [24:51]

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana ... ulangi, berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

- 1. Mengabulkan Permohon[sic!] Pemohon untuk seluruhnya.
- Membatalkan Keputusan kapu ... KPU Kabupaten Mesuji Nomor 1202 Tahun 2024 tanggal 22 September 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mesuji dalam memilih Bupati dan wa ... Wakil Bupati Kabupaten Mesuji Tahun 2024 seban ... sepanjang menyangkut penetapan Pasangan Calon Nomor Urut 2 di atas, nama Hj. Elfianah, S.E. - M. Yugi Wicaksono, S.M.
- 3. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mesuji Nomor 1800 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupa ... bati[sic!] Kabupaten Mesuji Tahun 2024 tanggal 3 Desember 2024, sepanjang perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Hj. Elfianah, S.E. M. Yugi Wicaksono, S.M.
- 4. Menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 4 atas nama H. Suprapto, S.Psi., M.H. dan Fuad Amrullah, S.E., selaku pemenang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mesuji Tahun 2024, dengan perolehan=37.978 suara.
- 5. Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Mesuji untuk menerbitkan keputusan Penetapan Calon Nomor Urut 4 atas nama H. Suprapto, S.Psi., M.H. dan Fuad Amrullah, S.E. sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mesuji terpilih Tahun 2024 dengan memperoleh ... dengan perolehan suara=37.978 suara.

Atau setidak-tidaknya.

- 6. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mesuji Nomor 1800 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mesuji Tahun 2024 tanggal 3 Desember 2024, sepanjang menyangkut perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Hj. Elfianah, S.E. dan M. Yugi Wicaksono, S.M.
- 7. Menempatkan[sic!] perolehan suara hasil Pemilihan Bupati dan wak (...)

#### 170. KETUA: SALDI ISRA [27:12]

Menetapkan.

### 171. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 39/PHPU.BUP-XXIII/2025: ZAINAL RACHMAN [24:14]

Menetapkan, izin ulangi. Menetapkan perolehan suara hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dalam Keputusan KPU Kabupaten Mesuji tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mesuji Tahun 2024 tanggal 3 Desember 2024, yang benar menurut Mahkamah adalah sebagai berikut.

### 172. KETUA: SALDI ISRA [27:35]

Tabel dianggap dibacakan, ya.

## 173. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 39/PHPU.BUP-XXIII/2025: ZAINAL RACHMAN [27:37]

Dianggap dibacakan.

#### 174. KETUA: SALDI ISRA [27:38]

Ya.

## 175. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 39/PHPU.BUP-XXIII/2025: ZAINAL RACHMAN [27:38]

Atau setidaknya.

- 8. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mesuji Nomor 1800 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mesuji Tahun 2024 tanggal 3 Desember 2024, sepanjang menyangkut perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Hj. Elfianah, S.E. M. Yugi Wicaksono, S.M.
- 9. Memerintahkan pemungutan suara ulang di seluruh TPS se-Kabupaten Mesuji, Provinsi Lampung.
- 10. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mesuji untuk tunduk dan patuh melaksanakan putusan ini.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya, ex aequo et bono.

Demikian Permohonan ini kami sampaikan. Atas perhatian Yang Mulia, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami, Kuasa Hukum Pemohon Raden Ananto Pratomo, Susi Tur Andayani (...)

### 176. KETUA: SALDI ISRA [28:31]

Cukup, jangan dibaca semua (...)

### 177. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 39/PHPU.BUP-XXIII/2025: ZAINAL RACHMAN [28:33]

Ya. Terima kasih, Yang Mulia.

### 178. KETUA: SALDI ISRA [28:33]

Ini pertanyaan, itu Petitum Anda lihat, di halaman 7.

# 179. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 39/PHPU.BUP-XXIII/2025: ZAINAL RACHMAN [28:40]

Baik, Yang Mulia.

#### 180. KETUA: SALDI ISRA [28:43]

Itu, Petitum menjelang angka 6 itu, itu alternatif atau kumulatif?

## 181. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 39/PHPU.BUP-XXIII/2025: ZAINAL RACHMAN [28:52]

Izin, Yang Mulia. Kumulatif, Yang Mulia.

### 182. KETUA: SALDI ISRA [28:53]

Kumulatif, ya?

# 183. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 39/PHPU.BUP-XXIII/2025: ZAINAL RACHMAN [28:54]

Ya, Yang Mulia.

#### 184. KETUA: SALDI ISRA [28:59]

Oke. Itu angka 6, angka 7, itu kumulatif terhadap angka berapa?

### 185. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 39/PHPU.BUP-XXIII/2025: ZAINAL RACHMAN [29:03]

Terhadap poin yang di atasnya, Yang Mulia (...)

#### 186. KETUA: SALDI ISRA [29:03]

Yang di atasnya kan ada 5 poinnya itu (...)

### 187. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 39/PHPU.BUP-XXIII/2025: ZAINAL RACHMAN [29:06]

5, Yang Mulia.

### 188. KETUA: SALDI ISRA [29:03]

Ke lima-limanya atau poin 5 saja?

# 189. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 39/PHPU.BUP-XXIII/2025: ZAINAL RACHMAN [29:11]

Ke lima-limanya, Yang Mulia.

### 190. KETUA: SALDI ISRA [29:13]

Ke lima-limanya?

# 191. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 39/PHPU.BUP-XXIII/2025: ZAINAL RACHMAN [29:14]

Ya, Yang Mulia.

### 192. KETUA: SALDI ISRA [29:14]

Ini jangan-jangan Anda ndak ngerti juga nih, apa yang dimaksud dengan Petitum 6 dan 7 ini. Kalau 8, 9 itu, itu alternatif untuk apa, kumulatif atau alternatif?

## 193. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 39/PHPU.BUP-XXIII/2025: ZAINAL RACHMAN [29:29]

Alternatif, Yang Mulia.

### 194. KETUA: SALDI ISRA [29:32]

Alternatif?

## 195. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 39/PHPU.BUP-XXIII/2025: ZAINAL RACHMAN [29:32]

Ya, Yang Mulia.

### 196. KETUA: SALDI ISRA [29:34]

Oke, kalau di atasnya tadi, 6 dan 7 itu kumulatif? Ya?

## 197. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 39/PHPU.BUP-XXIII/2025: ZAINAL RACHMAN [29:39]

Ya, Yang Mulia.

# 198. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 39/PHPU.BUP-XXIII/2025: ZAINAL RACHMAN [29:40]

Nah, sementara yang berikutnya, 8 dan 9 itu alternatif terhadap apa?

## 199. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 39/PHPU.BUP-XXIII/2025: ZAINAL RACHMAN [29:51]

Alternatif pada ... untuk poin 4, Yang Mulia.

### 200. KETUA: SALDI ISRA [29:55]

Oke, ini saya ... dicatat baik loh.

# 201. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 39/PHPU.BUP-XXIII/2025: ZAINAL RACHMAN [29:58]

Baik, Yang Mulia.

#### 202. KETUA: SALDI ISRA [29:58]

Ya.

# 203. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 39/PHPU.BUP-XXIII/2025: ZAINAL RACHMAN [29:58]

Baik, Yang Mulia.

#### 204. KETUA: SALDI ISRA [30:00]

Ini heran juga saya, kalimatnya sama, ya. *Atau setidak-tidaknya, atau setidak-tidaknya* juga, tapi yang satu alternatif, yang satu kumulatif. Nah, ini temuan baru juga dengan saya nih sebetulnya.

Oke, cukup?

### 205. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 39/PHPU.BUP-XXIII/2025: ZAINAL RACHMAN [30:17]

Baik, Yang Mulia. Cukup.

### 206. KETUA: SALDI ISRA [30:19]

Cukup.

## 207. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 39/PHPU.BUP-XXIII/2025: ZAINAL RACHMAN [30:19]

Terima kasih. Assalamualaikum wr. wb.

#### 208. KETUA: SALDI ISRA [30:22]

Waalaikumsalam, terima kasih. Ada yang mau didalami? Yang Mulia, Pak Arsul.

### 209. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [30:30]

Sedikit saja, Yang Mulia Pak Ketua Panel. Ini Pemohon, ya.

## 210. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 39/PHPU.BUP-XXIII/2025: ZAINAL RACHMAN [30:35]

Baik, Yang Mulia.

#### 211. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [30:35]

Ini kan ... beberapa poin mendalilkan, bahwa Termohon telah melakukan kecurangan, melakukan pelanggaran pemilu. Ada enggak ini, yang kemudian dilaporkan ke Bawaslu?

# 212. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 39/PHPU.BUP-XXIII/2025: ZAINAL RACHMAN [30:52]

Izin, Yang Mulia. Menjawab.

Pada proses tersebut, ada yang dilaporkan ke Pihak Bawaslu, Yang Mulia.

#### 213. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [31:01]

Ada, ya?

## 214. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 39/PHPU.BUP-XXIII/2025: ZAINAL RACHMAN [31:01]

Ya, Yang Mulia.

### 215. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [31:01]

Nanti akan jadi bukti apa enggak?

# 216. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 39/PHPU.BUP-XXIII/2025: ZAINAL RACHMAN [31:05]

Kami jadikan bukti, Yang Mulia.

### 217. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [31:05]

Oke. Ya sudah, itu saja dulu.

## 218. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 39/PHPU.BUP-XXIII/2025: ZAINAL RACHMAN [31:10]

Terima kasih, Yang Mulia.

#### 219. KETUA: SALDI ISRA [31:13]

Cukup. Yang Mulia Pak Ridwan?

#### 220. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [31:16]

Terima kasih, Yang Mulia Ketua.

# 221. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 39/PHPU.BUP-XXIII/2025: ZAINAL RACHMAN [31:16]

Baik, Yang Mulia.

#### 222. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [31:18]

Saudara Pemohon, ini kan dari beberapa hal yang Saudara sampaikan. Waktu selesai, itu saksi-saksi menandatangani ndak seluruhnya? Hasil itu?

## 223. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 39/PHPU.BUP-XXIII/2025: SUSI TUR ANDAYANI [31:34]

Izin, Yang Mulia.

### 224. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [31:36]

Ya.

# 225. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 39/PHPU.BUP-XXIII/2025: SUSI TUR ANDAYANI [31:36]

Ketika di beberapa TPS itu saksi-saksi ada yang sudah menandatangani C-1, sebelum proses pemungutan[sic!] suara dilakukan (...)

### 226. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [31:35]

He em.

# 227. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 39/PHPU.BUP-XXIII/2025: SUSI TUR ANDAYANI [31:35]

Tapi pada saat pengumuman, saksi-saksi tanda tangan.

#### 228. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [31:47]

Seluruhnya tanda tangan?

## 229. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 39/PHPU.BUP-XXIII/2025: SUSI TUR ANDAYANI [31:48]

Ya.

#### 230. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [31:48]

Oh, ya. Baik, cukup, Yang Mulia.

#### 231. KETUA: SALDI ISRA [31:50]

Cukup, ya. Jadi ada dilaporkan ya ke Bawaslu, ya?

## 232. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 39/PHPU.BUP-XXIII/2025: ZAINAL RACHMAN [31:56]

Ada, Yang Mulia.

### 233. KETUA: SALDI ISRA [31:55]

Apa hasil laporannya?

# 234. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 39/PHPU.BUP-XXIII/2025: SUSI TUR ANDAYANI [31:59]

Hasilnya yang mengenai APK tidak di (ucapan tidak terdengar jelas) pada masa tenang itu dihentikan, tetapi pada saat penetapan bakal calon atau belum penetapan calon, beberapa Bawaslu berkomentar bahwa tidak secara ... dilakukan secara terbuka, gitu, Yang Mulia.

#### 235. KETUA: SALDI ISRA [32:14]

Berapa ... berapa kali Ibu melapor, Bu, ini pasangan calon yang Ibu wakili?

# 236. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 39/PHPU.BUP-XXIII/2025: SUSI TUR ANDAYANI [32:19]

Kebetulan bukan saya mewakili, tapi ada tim (...)

#### 237. KETUA: SALDI ISRA [32:22]

Ya, timnya sudah berapa kali (...)

## 238. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 39/PHPU.BUP-XXIII/2025: SUSI TUR ANDAYANI [32:22]

Timses.

#### 239. KETUA: SALDI ISRA [32:22]

Melapor ke Bawaslu?

# 240. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 39/PHPU.BUP-XXIII/2025: SUSI TUR ANDAYANI [32:25]

Dua kali, Yang Mulia.

### 241. KETUA: SALDI ISRA [32:26]

Dua kali itu soal apa saja?

# 242. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 39/PHPU.BUP-XXIII/2025: SUSI TUR ANDAYANI [32:28]

Yang satu mengenai tidak ada penurunan APK ketika masa tenang.

### 243. KETUA: SALDI ISRA [32:31]

Ya.

## 244. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 39/PHPU.BUP-XXIII/2025: SUSI TUR ANDAYANI [32:31]

Yang kedua mengenai proses penetapan calon itu yang dilakukan secara tergesa-gesa gitu, Yang Mulia.

### 245. KETUA: SALDI ISRA [32:38]

Oke.

# 246. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 39/PHPU.BUP-XXIII/2025: SUSI TUR ANDAYANI [32:38]

Terima kasih.

#### 247. KETUA: SALDI ISRA [32:38]

Tergesa-gesa ini, buru-buru ya, Bu, ya?

# 248. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 39/PHPU.BUP-XXIII/2025: SUSI TUR ANDAYANI [32:41]

Ya.

### 249. KETUA: SALDI ISRA [32:43]

Oke. Biar nanti dijawab Bawaslu itu, Pak Totok. Itu dua poin yang dilaporkan APK, satu, yang kedua itu soal penetapan calon. Ini salah satu inti yang dipersoalkan itu ada perbedaan identitas dan itu yang dianggap sebagai pengaburan identitas dalam Permohonan ini.

Satu identitas yang muncul di putusan ... apa ... di Putusan Mahkamah Agung, satu identitas yang masuk melewat NIK, yang itu ... yang digunakan ketika mendaftar sebagai calon, nah itu.

Nah pertanyaannya nanti biar dijelaskan dalam perkembangannya, apakah yang dimaksud dalam Putusan Mahkamah Agung itu benar atau tidak orang yang bersangkutan. Paham, ya? Termohon, ya, untuk Mesuji? Oke, kalau paham, alhamdulillah. Cukup, ini sudah selesai, satu nomor.

Yang kedua. Perkara Nomor 169, Kota Batam.

# 250. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 169/PHPU.WAKO-XXIII/2025: ERIK SETIAWAN [33:42]

Baik, terima kasih.

Kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Pemeriksa Perkara 169/PHPU.WAKO-XXIII/2025. Kami Tim Hukum Nadi, mewakili Nuryanto dan Hardi Hood selaku wakil wali kota ... Calon Wali Kota Batam dan Wakil Wali Kota Batam. Dalam hal ini mengajukan Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Batam Tahun 2024 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Batam Nomor 744 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Batam Tahun 2024, juncto Berita Acara dan sertifikat rekapitulasi hasil perhitungan suara dari setiap kecamatan di tingkat kabupaten/kota dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024. Adapen ... adapun Permohonan ini, kami sampaikan adalah sebagai berikut.

Kewenangan Mahkamah Konstitusi, dianggap dibacakan.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan, dianggap dibacakan.

Kedudukan Hukum/Legal Standing Pemohonan, dianggap dibacakan.

Izin, Yang Mulia.

### 251. KETUA: SALDI ISRA [35:00]

Ya.

# 252. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 169/PHPU.WAKO-XXIII/2025: ERIK SETIAWAN [35:00]

Ingin menyampaikan dengan bahasa yang tidak terlalu kaku seperti bahasa hukum, kami Tim Hukum menyampaikan pengantar ura ... uraian sebelum masuk perkara tentang terjadi perkara selama prapemilu (...)

### 253. KETUA: SALDI ISRA [35:11]

Pengantarnya tidak usah dibacakan, ke Pokok-Pokok Permohonan saja.

# 254. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 169/PHPU.WAKO-XXIII/2025: ERIK SETIAWAN [35:13]

Baik. Izin menyampaikan, Yang Mulia.

Adanya upaya menghadirkan calon tunggal dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Batam, kami ingin memberikan sedikit pantun, Yang Mulia. Mohon diberikan izin.

### 255. KETUA: SALDI ISRA [35:26]

Wah, silakan.

## 256. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 169/PHPU.WAKO-XXIII/2025: ERIK SETIAWAN [35:26]

Naik kapal perahu laju Pergi memancing bersama Pak Nadi Jika masyarakat Kota Batam ingin maju Mari menjunjung tinggi demokrasi

Maju negeri ada terpandang Rasa budaya jadi pedoman Ke Mahkamah Konstitusi kami bertandang Memperjuangkan hak konstitusional masyarakat Kota Batam

### 257. KETUA: SALDI ISRA [35:46]

Cakep.

# 258. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 169/PHPU.WAKO-XXIII/2025: ERIK SETIAWAN [35:46]

Mencari keadilan (...)

## 259. KETUA: SALDI ISRA [35:47]

Tunggu dahulu, jawab dahulu.

## 260. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 169/PHPU.WAKO-XXIII/2025: ERIK SETIAWAN [35:48]

Ya.

### 261. KETUA: SALDI ISRA [35:47]

Cakep, begitu.

# 262. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 169/PHPU.WAKO-XXIII/2025: ERIK SETIAWAN [35:48]

Cakep.

### 263. KETUA: SALDI ISRA [35:51]

Silakan.

## 264. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 169/PHPU.WAKO-XXIII/2025: ERIK SETIAWAN [35:51]

Ya. Mencari keadilan dan kemenangan untuk rakyat Batam bahwa sejak dimulainya konsta ... konstestasi (...)

#### 265. KETUA: SALDI ISRA [35:57]

Itu tidak perlu, ya. Yang ... yang kayak begitu, langsung ke Pokok Permohonan.

## 266. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 169/PHPU.WAKO-XXIII/2025: ERIK SETIAWAN [36:00]

Izin, Yang Mulia. Ini perlu kami sampaikan sedikit, sebelum kami lanjutkan ke Pokok Permohonan, Yang Mulia. Mohon izin, ya, Yang Mulia.

#### 267. KETUA: SALDI ISRA [36:08]

Ya, diizinkanlah.

## 268. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 169/PHPU.WAKO-XXIII/2025: ERIK SETIAWAN [36:09]

Baik.

### 269. KETUA: SALDI ISRA [36:09]

Ya.

## 270. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 169/PHPU.WAKO-XXIII/2025: ERIK SETIAWAN [36:10]

Bahwa sejak dimulainya kontestasi Pilkada Kota Batam Tahun 2024, yang mana kehadiran Calon Wali Kota wak ... Batam, Li Claudia Chandra telah mengubah perpolitikan di Kota Batam, Bakal Calon Wali Kota Batam dan Wakil Wali Kota Batam yang dulunya digadang-gadang akan maju sebagai bakal calon, perlahan-lahan tidak dapat maju sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota Batam. Sebab satu per satu partai politik sebagai partai pengusung mendukung pencalonan Amsakar Ahmad dan Li Claudia Chandra sebagai Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Batam, Li Claudia Chandra diusung oleh Partai Gerindra, yang pada tahapan pilkada bersamaan dengan penyusunan Kabinet Indonesia Maju, Kabinet Presiden Prabowo Subianto. Pengaruh dukungan Partai Gerindra terhadap pencalonan (...)

### 271. KETUA: SALDI ISRA [36:51]

Bacanya pelan-pelan!

# 272. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 169/PHPU.WAKO-XXIII/2025: ERIK SETIAWAN [36:10]

Baik.

#### 273. KETUA: SALDI ISRA [36:51]

Kalau ada titik, berhenti. Begitu, ya?

# 274. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 169/PHPU.WAKO-XXIII/2025: ERIK SETIAWAN [36:10]

Bertindak pada dukungan partai-partai lainnya terhadap pencalonan Paslon 02. Dan pada akhirnya, bakal calon lainnya tidak bisa maju sebagai kepala daerah, disebabkan tidak memenuhi ambang batas. Karena itu, hanya meninggalkan PDIP yang belum mengajukan bakal calon, sebab perolehan kursi PDIP di DPRD Kota Batam hanya 7 kursi. Dan sesuai aturan saat itu, tidak memenuhi ambang batas 20%. Sedangkan, syarat bakal calon untuk maju di Pilkada Batam harus dapat dukungan minimal 10 kursi di DPRD Kota Batam.

Fenomena calon tunggal dalam kontestasi pidana ... pilkada terha ... seharusnya berjalan natural dan alamiah karena situasi justru dijadikan prakondisi pada proses Pilkada Kota Batam Tahun 2024 sengaja diciptakan dengan harapan menang pilkada dengan mudah, yaitu dengan menarik seluruh partai politik yang menguliti kursi DPRD Kota Batam. Bahwa demokrasi Indonesia telah diselamatkan oleh Mahkamah Konstitusi dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 yang menghapus ambang batas 20%, sehingga Pilkada Kota Batam tidak menghadiri calon tunggal.

Dan akan tetapi, berjalannya proses Kontestasi Pilkada Kota Batam daripada masa belum dimulainya penetapan bakal calon, penetapan bakal calon sampai dengan tahapan kampanye dan pencoblosan, terjadi degradasi demokrasi. Semua jalan ditempuh untuk menghadiri sebuah kemenangan. Segala upaya dan tindakan ditempuh dan pada akhirnya, Pilkada Kota Batam diwarnai berbagai macam pelanggaran. Diwarnai pembagian sembako, mengatasnamakan syukuran kemenangan atas nama Prabowo Subianto sebagai Presiden. Terjadi pembagian uang kepada pemilih, ketidaknetralan ASN, Polri. Bahkan lebih menyedihkan kita, sang Penyelenggara Pemilihan, baik KPU Kota Batam, maupun baswal ... Bawaslu Kota Batam ikut dengan pihak yang telah mendegrasi demokrasi, pihak yang menghendaki adanya calon tunggal dalam Pilkada Kota Batam.

Kami lanjutkan terkait Pokok Permohonan.

Bahwa berdasarkan penetapan hasil pemilihan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing Pasangan Calon Nuryanto-Hardi mendapatkan perolehan suara sebesar 142.245 suara. Sedangkan, Ach ... Amsakar Achmad dan Li Claudia mendapatkan suara 278 rib ... saya ulangi. 278.132 suara dari total 421.377 suara, yang mana terjadi perselisihan perolehan suara sebesar 134.887 suara atau selisih perolehan suara sekitar 32%.

Bahwa menurut Permohon[sic!], selisih perolehan suara Pemohon tersebut disebabkan adanya pelanggaran TSM, terstruktur, sistematis, dan masif yang berupaya ... berupa kecurangan pelanggaran netralitis ... netralitas aparat pemerintah maupun penyelenggara pemilihan, yaitu lembaga pemilu ... Pemilihan Umum dan badas ... Badan Pengawas Pemilu dengan tujuan untuk berpihak kepada salah satu pasangan calon.

Bahwa Pemohon sangat keberatan atas proses Pemilukada Wali Kota dan Wakil Wali Kota Batam sampai dengan hasil pemilihan ... suara pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Batam Tahun 2024, yang dibuat oleh Termohon, seperti yang tertuang dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Batam Nomor 744 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Batam Tahun 2024 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan wakli [sic!] Kota dan Wakil Wali Kota Batam 2024, tertanggal 5 Desember 2024, juncto Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan

Suara dari setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024. Karena telah terjadi pelanggaran-pelanggaran (...)

### 275. KETUA: SALDI ISRA [41:12]

Halo?

## 276. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR PERKARA 169/PHPU.WAKO-XXIII/2025: ERIK SETIAWAN [40:13]

Ya.

### 277. KETUA: SALDI ISRA [41:14]

Kalau Anda bacakan begitu, enggak selesai ini 15 menit.

## 278. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR PERKARA 169/PHPU.WAKO-XXIII/2025: ERIK SETIAWAN [41:16]

Ya, sudah. Baik, Yang Mulia.

### 279. KETUA: SALDI ISRA [41:18]

Silakan, yang poin-poinnya saja. Kita sudah punya kok, semua.

## 280. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR PERKARA 169/PHPU.WAKO-XXIII/2025: ERIK SETIAWAN [41:22]

Oke. Baik, siap.

#### 281. KETUA: SALDI ISRA [41:25]

Apa lagi poinnya?

# 282. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR PERKARA 169/PHPU.WAKO-XXIII/2025: ERIK SETIAWAN [41:25]

Bahwa oleh karena Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Batam Tahun 2024 telah nyata-nyata tidak sesuai dengan prinsip luber dan jurdil, maka dengan ini, Pemohon mengajukan perlindungan hukum kepada moh ... Mahkamah Konstitusi selaku pengawal konstitusi, agar kiranya Paslon 2, dapat dibatalkan. Pelanggaran kecurangan terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif di seluruh wilayah Kota Batam, yang akan diuraikan secara terperinci di bawah ini.

Kecurangan terstruktur tentang kecurangan aparat pejabat struktural, baik aparat pemerintah (...)

### 283. KETUA: SALDI ISRA [41:57]

Udah, satu.

# 284. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR PERKARA 169/PHPU.WAKO-XXIII/2025: ERIK SETIAWAN [41:59]

Baik.

### 285. KETUA: SALDI ISRA [42:00]

Saya pandu saja Anda lah, kalau begitu.

## 286. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR PERKARA 169/PHPU.WAKO-XXIII/2025: ERIK SETIAWAN [42:01]

Baik, Yang Mulia.

### 287. KETUA: SALDI ISRA [41:59]

Daripada baca. Ini ada kecurangan terstruktur, apa itu? Jangan dibacakan, jelaskan!

# 288. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR PERKARA 169/PHPU.WAKO-XXIII/2025: ERIK SETIAWAN [42:08]

Kecurangan struktur berupa money politics, pembagian sembako (...)

#### 289. KETUA: SALDI ISRA [42:12]

Oke.

## 290. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR PERKARA 169/PHPU.WAKO-XXIII/2025: ERIK SETIAWAN [42:12]

Dan ketidaknetralan ASN, Yang Mulia.

#### 291. KETUA: SALDI ISRA [42:14]

Yang masifnya, di mana? Sistematisnya, di mana?

## 292. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR PERKARA 169/PHPU.WAKO-XXIII/2025: ERIK SETIAWAN [42:18]

Sistematis ter ... terstrukturnya, Yang Mulia, dia berjalan seolaholah terlindungi.

### 293. KETUA: SALDI ISRA [42:25]

Oke. Kalau yang masifnya?

# 294. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR PERKARA 169/PHPU.WAKO-XXIII/2025: ERIK SETIAWAN [42:28]

Masif bergerak secara diam, tapi terlaksana dengan baik, Yang Mulia.

### 295. KETUA: SALDI ISRA [42:34]

Oke. Nah, oke. Itu, ya, yang TSM. Jadi itu TSM Anda sebutkan, di halaman 16 dan 17. Dua halaman, ada buktinya enggak, itu?

## 296. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR PERKARA 169/PHPU.WAKO-XXIII/2025: ERIK SETIAWAN [42:51]

Ada, Yang Mulia.

#### 297. KETUA: SALDI ISRA [42:51]

Bukti P, berapa?

# 298. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR PERKARA 169/PHPU.WAKO-XXIII/2025: ERIK SETIAWAN [42:55]

Bukti P-1 sampai P-18, Yang Mulia.

### 299. KETUA: SALDI ISRA [42:58]

Bukan. P-1 sampai P-18 itu, ada identitas dan segala macam, kalau di situ.

# 300. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR PERKARA 169/PHPU.WAKO-XXIII/2025: ERIK SETIAWAN [43:03]

Ada, Yang Mulia.

### 301. KETUA: SALDI ISRA [43:05]

Nah. Ada, ya?

## 302. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR PERKARA 169/PHPU.WAKO-XXIII/2025: ERIK SETIAWAN [43:07]

Ada.

#### **303. KETUA: SALDI ISRA [43:06]**

Ini karena di Permohonan Saudara ini halaman 17 dan ... 16 dan 17 itu tidak sama sekali menyebut Bukti P berapa.

Oke? Lanjut, kemudian kecurangan-kecurangan yang terjadi, apa? Apa kecurangan?

## 304. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR PERKARA 169/PHPU.WAKO-XXIII/2025: ERIK SETIAWAN [43:25]

Pemanfaatan jabatan selaku Aparatur Sipil Negara, untuk menguntungkan dan mengkampanyekan Paslon 02, Yang Mulia.

## **305. KETUA: SALDI ISRA [43:32]**

Ya. Siapa yang memanfaatkan, ini?

## 306. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR PERKARA 169/PHPU.WAKO-XXIII/2025: ERIK SETIAWAN [43:35]

Bahwa telah terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh Rasman Apandi selaku Lurah Sungai Pelungut, yang dilakukan pada masa kampanye di wilayah pemilihan Kota Batam dengan secara langsung untuk mengarahkan dukungan terhadap Paslon 02 dan hal ini telah dilaporkan ke Bawaslu Kota Batam, dengan Laporan 004/Reg/LP/PW/Kota/10/02/X/2024[sic!] dengan status (...)

#### 307. KETUA: SALDI ISRA [44:00]

Oke, apa hasilnya?

# 308. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 169/PHPU.WAKO-XXIII/2025: ERIK SETIAWAN [44:00]

Laporan diteruskan.

### 309. KETUA: SALDI ISRA [44:01]

Oke, Apa hasilnya? Apa hasilnya laporan diteruskan?

## 310. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 169/PHPU.WAKO-XXIII/2025: ERIK SETIAWAN [44:04]

Laporkan diteruskan.

### 311. KETUA: SALDI ISRA [44:05]

Terus setelah itu, setelah diteruskan, bagaimana perkembangannya?

## 312. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 169/PHPU.WAKO-XXIII/2025: ERIK SETIAWAN [44:08]

Sampai sekarang belum ada perkembangan yang kita lihat, Yang Mulia.

### 313. KETUA: SALDI ISRA [44:12]

Belum ada, ya?

# 314. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 169/PHPU.WAKO-XXIII/2025: ERIK SETIAWAN [44:12]

Belum ada.

#### 315. KETUA: SALDI ISRA [44:13]

Oke, lanjut.

# 316. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 169/PHPU.WAKO-XXIII/2025: ERIK SETIAWAN [44:16]

Oke.

### 317. KETUA: SALDI ISRA [44:17]

Apa lagi?

## 318. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 169/PHPU.WAKO-XXIII/2025: ERIK SETIAWAN [44:21]

Pemanfaatan program pemerintah pusat berupa bantuan sembako untuk keuntungan Paslon 02.

### 319. KETUA: SALDI ISRA [44:26]

Oke. Bantuan pemerintah pusat berupa sembako untuk keuntungan Paslon 02. Ini bagaimana caranya nih? Bentuknya bagaimana?

# 320. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 169/PHPU.WAKO-XXIII/2025: ERIK SETIAWAN [44:35]

Bahwa program bagi-bagi sembako dilakukan oleh Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Riau dari Partai Gerinda, yaitu atas nama Imam[sic!] Sutiawan S.E., M.M. dan juga selaku Ketua Tim Kampanye Paslon 02.

### 321. KETUA: SALDI ISRA [44:45]

Oke, satu-satu dulu, ya.

## 322. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 169/PHPU.WAKO-XXIII/2025: ERIK SETIAWAN [44:47]

Baik.

#### 323. KETUA: SALDI ISRA [44:48]

Ini ... ini Pak Imam[sic!] Sutiawan ini Ketua DPRD?

## 324. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 169/PHPU.WAKO-XXIII/2025: ERIK SETIAWAN [44:52]

Ya.

#### 325. KETUA: SALDI ISRA [44:53]

Periode berapa?

# 326. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 169/PHPU.WAKO-XXIII/2025: ERIK SETIAWAN [44:57]

Periode saat ini, Yang Mulia.

### 327. KETUA: SALDI ISRA [44:59]

Periode 2024 (...)

# 328. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 169/PHPU.WAKO-XXIII/2025: ERIK SETIAWAN [45:01]

2024.

#### 329. KETUA: SALDI ISRA [45:03]

2029.

## 330. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 169/PHPU.WAKO-XXIII/2025: ERIK SETIAWAN [45:03]

Baik.

#### 331. KETUA: SALDI ISRA [45:03]

Oke. Lalu, ini dilakukan pada masa kampanye, ya?

# 332. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 169/PHPU.WAKO-XXIII/2025: ERIK SETIAWAN [45:08]

Ya, Yang Mulia.

#### 333. KETUA: SALDI ISRA [45:10]

Ini ada dilaporkan, enggak?

## 334. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 169/PHPU.WAKO-XXIII/2025: ERIK SETIAWAN [45:11]

Sudah kita laporkan, Yang Mulia.

#### 335. KETUA: SALDI ISRA [45:13]

Dilaporkan ke Bawaslu?

# 336. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 169/PHPU.WAKO-XXIII/2025: ERIK SETIAWAN [45:13]

Baik.

#### 337. KETUA: SALDI ISRA [45:15]

Apa tindak lanjutnya?

# 338. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 169/PHPU.WAKO-XXIII/2025: ERIK SETIAWAN [45:16]

Dihentikan, Yang Mulia.

### 339. KETUA: SALDI ISRA [45:18]

Dihentikan. Nanti kita akan tanya.

## 340. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 169/PHPU.WAKO-XXIII/2025: ERIK SETIAWAN [45:21]

Baik.

#### 341. KETUA: SALDI ISRA [45:21]

Apa lagi?

# 342. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 169/PHPU.WAKO-XXIII/2025: ERIK SETIAWAN [45:28]

Masifnya pemberian uang money politics kepada pemilih untuk memilih Paslon 02 yang dilakukan oleh Tim Kampanye 02.

#### 343. KETUA: SALDI ISRA [45:35]

Oke. Itu masif itu semua orang dikasih uang, ya?

# 344. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 169/PHPU.WAKO-XXIII/2025: ERIK SETIAWAN [45:39]

Bisa jadi, Yang Mulia.

Ya karena kita kan, enggak memantau untuk semuanya, Yang Mulia.

### 345. KETUA: SALDI ISRA [45:44]

Nah, yang Anda ketahui berapa (...)

## 346. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 169/PHPU.WAKO-XXIII/2025: ERIK SETIAWAN [45:45]

Oke.

### 347. KETUA: SALDI ISRA [45:45]

Kalau begitu?

# 348. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 169/PHPU.WAKO-XXIII/2025: ERIK SETIAWAN [45:47]

Politik uang pemberian (...)

### 349. KETUA: SALDI ISRA [45:47]

Ini di sini kan ada angka Rp5.650.000,00.

# 350. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 169/PHPU.WAKO-XXIII/2025: ERIK SETIAWAN [45:51]

Ya, Yang Mulia.

### 351. KETUA: SALDI ISRA [45:52]

Itu didapati dari salah seorang, ya?

# 352. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 169/PHPU.WAKO-XXIII/2025: ERIK SETIAWAN [45:55]

Benar.

#### 353. KETUA: SALDI ISRA [45:56]

Ada lagi yang lain?

## 354. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 169/PHPU.WAKO-XXIII/2025: ERIK SETIAWAN [45:59]

Ada, Yang Mulia.

#### 355. KETUA: SALDI ISRA [46:00]

Di mana?

## 356. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 169/PHPU.WAKO-XXIII/2025: ERIK SETIAWAN [46:01]

Pada tanggal 26 November 2004[sic!] 2024, telah tertangkap tangan money politics atas nama M. Jamil, telah dilaporkan juga oleh Saudara Hendra Redikson Lumban Siantar ke Bawaslu Kota Batam dengan Nomor Laporan 015/Registrasi (...)

### 357. KETUA: SALDI ISRA [46:15]

Oke (...)

# 358. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 169/PHPU.WAKO-XXIII/2025: ERIK SETIAWAN [46:01]

Baik.

### 359. KETUA: SALDI ISRA [46:16]

M. Jamil ini yang menerima duit atau yang memberikan uang?

## 360. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 169/PHPU.WAKO-XXIII/2025: ERIK SETIAWAN [46:18]

Yang memberikan uang.

#### 361. KETUA: SALDI ISRA [46:19]

Memberikan uang.

# 362. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 169/PHPU.WAKO-XXIII/2025: ERIK SETIAWAN [46:20]

Ya.

#### 363. KETUA: SALDI ISRA [46:21]

Lalu tertangkapnya, apa ... apa yang tertangkap di situ, uangnya?

## 364. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 169/PHPU.WAKO-XXIII/2025: ERIK SETIAWAN [46:24]

Ya ada, Yang Mulia.

### 365. KETUA: SALDI ISRA [46:25]

Berapa banyak?

# 366. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 169/PHPU.WAKO-XXIII/2025: ERIK SETIAWAN [46:27]

M. Jamil.

### **367. KETUA: SALDI ISRA [46:32]**

Soalnya di Permohonannya enggak ada (...)

## 368. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 169/PHPU.WAKO-XXIII/2025: ERIK SETIAWAN [46:33]

Ya benar.

#### 369. KETUA: SALDI ISRA [46:34]

Tapi kalau yang lain tadi, ada tuh yang Rp5.650.000,00 itu.

# 370. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 169/PHPU.WAKO-XXIII/2025: ERIK SETIAWAN [46:37]

M. Jamil 500.000, Yang Mulia.

### 371. KETUA: SALDI ISRA [46:39]

Oh, 500.000? 500.000 kalau dibagi-bagi untuk 5 orang cuma itu, masing-masing 100.000?

# 372. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 169/PHPU.WAKO-XXIII/2025: ERIK SETIAWAN [46:45]

Ya.

#### 373. KETUA: SALDI ISRA N [46:46]

Oke.

## 374. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 169/PHPU.WAKO-XXIII/2025: ERIK SETIAWAN [46:45]

Kita enggak tahu, Yang Mulia, itu sebagai permulaan. Dan hal ini telah kita laporkan ke Bawaslu dengan status laporan dihentikan.

### 375. KETUA: SALDI ISRA [46:53]

"Kami laporkan," ya, jangan, "Kita laporkan." Saya enggak ikut melaporkan kok.

## 376. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 169/PHPU.WAKO-XXIII/2025: ERIK SETIAWAN [46:56]

Baik, baik.

### 377. KETUA: SALDI ISRA [46:57]

Ya.

## 378. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 169/PHPU.WAKO-XXIII/2025: ERIK SETIAWAN [46:57]

Baik, Yang Mulia.

### 379. KETUA: SALDI ISRA [46:58]

Terus?

## 380. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 169/PHPU.WAKO-XXIII/2025: ERIK SETIAWAN [47:00]

Pemanfaatan fasilitas pemerintah dalam kampanye terselubung dan membuat keuntungan Paslon 02.

#### 381. KETUA: SALDI ISRA [47:05]

Apa bentuknya itu?

# 382. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 169/PHPU.WAKO-XXIII/2025: ERIK SETIAWAN [47:06]

Bahwa telah diadakan konser Batak Marsada yang diadakan di Alun-Alun Dataran Engku Putri, yang mana merupakan fasilitas pemerintah yang dihadiri oleh Pasangan Calon 02. Hal ini telah dilaporkan oleh Oloan Sinurat ke Bawaslu Kota Batam. Dan atas laporan ini telah dihentikan oleh Bawaslu Kota Batam tanpa keterangan lebih lanjut.

### 383. KETUA: SALDI ISRA [47:29]

Laporannya yang dihentikan atau arak-arakannya itu, konsernya?

## 384. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 169/PHPU.WAKO-XXIII/2025: ERIK SETIAWAN [47:32]

Laporannya yang kita laporkan, Yang Mulia.

### 385. KETUA: SALDI ISRA [47:34]

Oh, laporannya yang dihentikan, bukan konsernya ya?

## 386. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 169/PHPU.WAKO-XXIII/2025: ERIK SETIAWAN [47:37]

Ya, Yang Mulia.

## 387. KETUA: SALDI ISRA [47:37]

Apa lagi? Ketidaknetralan Penyelenggara Komisi Pemilihan Umum Kota Batam.

# 388. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 169/PHPU.WAKO-XXIII/2025: ERIK SETIAWAN [46:01]

Ya. Keterlibatan Anggota Polri dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Batam, Yang Mulia.

#### 389. KETUA: SALDI ISRA [47:50]

Nah, bagaimana ceritanya? Coba.

# 390. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 169/PHPU.WAKO-XXIII/2025: ERIK SETIAWAN [47:52]

Bahwa Anggota Polri yang seharusnya bisa menjadi cermin contoh dan teladan dalam menjaga netralitas, justru terlihat sebaliknya dalam praktiknya di dalam kontestasi Pilkada Kota Batam, yang jauh dari kata netral dalam Penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Batam Tahun 2024, yang mana terlihat dalam foto Anggota Polri menyerahkan hasil Pleno Kecamatan Sekupang, Kota Batam.

### 391. KETUA: SALDI ISRA [48:16]

Nah itu Anggota Polri menyerahkan hasil Pleno, ya?

## 392. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 169/PHPU.WAKO-XXIII/2025: ERIK SETIAWAN [48:19]

Ya, Yang Mulia.

### 393. KETUA: SALDI ISRA [48:20]

Nah, di mana itu tidak netralnya itu?

# 394. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 169/PHPU.WAKO-XXIII/2025: ERIK SETIAWAN [48:24]

Karena harusnya tidak diserahkan oleh Anggota Polri, Yang Mulia.

### 395. KETUA: SALDI ISRA [48:27]

Oke. Jadi, karena dia menyerahkan hasilnya itu, itu lalu dianggap tidak netral, ya?

## 396. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 169/PHPU.WAKO-XXIII/2025: ERIK SETIAWAN [48:31]

Ya benar, Yang Mulia.

#### 397. KETUA: SALDI ISRA [48:32]

Oke, lanjut.

# 398. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 169/PHPU.WAKO-XXIII/2025: ERIK SETIAWAN [48:34]

Kemudian, keberatan saksi-saksi dalam catatan kejadian khusus dan/atau keberatan Saksi Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024.

### 399. KETUA: SALDI ISRA [48:47]

Oke, itu berapa banyaknya keberatan saksi?

## 400. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 169/PHPU.WAKO-XXIII/2025: ERIK SETIAWAN [48:50]

Bahwa saksi-saksi di 12 (...)

### 401. KETUA: SALDI ISRA [48:51]

Tunggu. Pertanyaan saya, Anda dengar dulu.

# 402. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 169/PHPU.WAKO-XXIII/2025: ERIK SETIAWAN [48:53]

Baik, Yang Mulia.

### 403. KETUA: SALDI ISRA [48:54]

Itu berapa banyak keberatannya?

## 404. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 169/PHPU.WAKO-XXIII/2025: ERIK SETIAWAN [48:58]

Keberatan di 12 kecamatan, Yang Mulia.

#### 405. KETUA: SALDI ISRA [49:02]

Di ... di 12 kecamatan itu semuanya?

# 406. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 169/PHPU.WAKO-XXIII/2025: ERIK SETIAWAN [49:05]

Ya, Yang Mulia.

#### 407. KETUA: SALDI ISRA [49:05]

Oke. Pertanyaan saya, berapa jumlah TPS di Batam itu?
Ini kalau jadi lawyer itu, harus tahu itu, kalau mewakili kabupaten, jumlah TPS kabupaten itu harus tahu, karena akan ada pertanyaan berikutnya ini.

Enggak tahu, ya?

# 408. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 169/PHPU.WAKO-XXIII/2025: ABDUL HAKIM [49:29]

Enggak tahu, Yang Mulia.

## 409. KETUA: SALDI ISRA [49:30]

Oke. KPU berapa jumlah TPS di Batam?

## **410. TERMOHON: MAWARDI [49:32]**

1.821, Mulia.

### 411. KETUA: SALDI ISRA [49:34]

18?

### **412. TERMOHON: MAWARDI [49:36]**

21 ... 1.821 (...)

### 413. KETUA: SALDI ISRA [49:37]

1.821, ya?

#### 414. TERMOHON: MAWARDI [49:48]

Ya.

#### 415. KETUA: SALDI ISRA [49:49]

Oke. Nah itu angkanya, ya, 1.821 Lawyer, Saudara Advokat, Kuasa Hukum.

## 416. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 169/PHPU.WAKO-XXIII/2025: ERIK SETIAWAN [49:47]

Ya, Yang Mulia.

### 417. KETUA: SALDI ISRA [48:48]

Dari 1.821 TPS ini, di berapa TPS ... apa ... saksi pasangan calon Anda yang mengajukan keberatan?

# 418. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 169/PHPU.WAKO-XXIII/2025: ERIK SETIAWAN [50:00]

Izin, Yang Mulia. Kita tidak mengetahui secara pasti, Yang Mulia.

### 419. KETUA: SALDI ISRA [50:01]

Oke. Jadi tidak tahu, ya? Karena ini kan, akan ... akan ada hubungannya dengan pelanggaran masif tadi itu.

Nah, harusnya paling tidak, ada angkanya lah yang disebut. Ini misalnya dari 1.800 itu di ti ... 1.500-nya ada keberatan dan segala macamnya. Ada punya catatan itu, enggak?

## 420. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 169/PHPU.WAKO-XXIII/2025: ERIK SETIAWAN [50:25]

Ada, Yang Mulia.

### 421. KETUA: SALDI ISRA [50:26]

Ada. Di mana itu bisa dilihat?

## 422. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 169/PHPU.WAKO-XXIII/2025: ERIK SETIAWAN [50:28]

Masih sama tim kita, Yang Mulia.

### 423. KETUA: SALDI ISRA [50:28]

Oke.

# 424. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 169/PHPU.WAKO-XXIII/2025: ERIK SETIAWAN [50:29]

Masih untuk pembuktian menyusul, Yang Mulia.

#### 425. KETUA: SALDI ISRA [50:31]

Kita tunggulah dengan sabar, kalau yang kayak begitu.

## 426. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 169/PHPU.WAKO-XXIII/2025: ERIK SETIAWAN [50:33]

Baik, Yang Mulia.

### 427. KETUA: SALDI ISRA [50:34]

Oke. Terakhir ini poin kurangnya partisipasi pemilih, silakan.

## 428. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 169/PHPU.WAKO-XXIII/2025: ERIK SETIAWAN [50:42]

Baik. Kurangnya partisipasi pemilih dalam Pilkada Kota Batam yang tidak mencapai 50%.

### 429. KETUA: SALDI ISRA [50:47]

Betul. KPU betul tidak mencapai 50%? Berapa persen?

### 430. TERMOHON: MAWARDI [50:51]

48%.

### 431. KETUA: SALDI ISRA [50:52]

48, ya? Oke. Ini dipersoalkan oleh mereka nih, nanti harus Anda jelaskan ini, karena katanya "Ini salah satu problem ini, kenapa 48%." Apa lagi? Langsung Petitum, ya?

# 432. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 169/PHPU.WAKO-XXIII/2025: ERIK SETIAWAN [51:05]

Baik, Yang Mulia.

### 433. KETUA: SALDI ISRA [51:06]

Silakan.

## 434. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 169/PHPU.WAKO-XXIII/2025: ERIK SETIAWAN [51:06]

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut.

- 1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
- 2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Batam nomor 480 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Batam dalam Penyelenggaraan Pemilihan Serentak Tahun 2024 tanggal 22 September 2024, sepanjang menyangkut penetapan Paslon Calon Nomor Urut 2 atas nama Calon Wali Kota H. Amsakar Achmad dan Calon Wali Kota ... Wakil Wali Kota Batam Li Claudia Chandra.
- 3. Membatalkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Batam Nomor 744 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Wali kota

- dan Wakil Wali Kota Batam Tahun 2024, juncto Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara dari setiap kecamatan di tingkat kabupaten/kota dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024.
- 4. Menyatakan Pasangan Calon Nomor Urut 2, atas nama Calon Wali Kota H. Amsakar Achmad dan Calon Wakil Wali Kota Batam Li Claudia Chandra di diskualifikasi.
- 5. Menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 1, atas nama Calon Wali Kota Nuryanto, S.H., M.H. dan Calon Wakil Wali Kota Drs. Hardi Selamat Hood, M.Si., Ph.D., selaku pemenang dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Batam Tahun 2024.
- Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Batam, untuk menerbitkan Keputusan Penetapan Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Calon Wali Kota Nuryanto, S.H., M.H. dan Calon Wakil Wali Kota Drs. Hardi Selamat Hood, M.Si., Ph.D., sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota Batam terpilih Tahun 2024.

Petitum Alternatif.

- 1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
- 2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Batam Nomor 480 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Batam, dalam Penyelenggara Pemilihan Serentak Tahun 2024, tanggal 22 September 2024, sepanjang menyangkut penetapan Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Calon Wali Kota H. Amsakar Achmad dan Calon Wakil Wali Kota Batam Li Claudia Chandra.
- 3. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kota Batam untuk melaksanakan pemungutan suara ulang 8 ... diulangi, Yang Mulia, di:
  - 1) Seluruh TPS Kecamatan Batam Kota.
  - 2) Seluruh TPS Kecamatan Lubuk Baja.
  - 3) Seluruh TPS Kecamatan Batu Ampar.
  - 4) Seluruh TPS Kecamatan Batu Aji.
  - 5) Seluruh TPS Kecamatan Sagulung.
  - 6) Seluruh TPS Kecamatan Sekupang.
  - 7) Seluruh TPS Kecamatan Belakang Padang.
  - 8) Seluruh TPS Kecamatan Galang. Subsider.

Apabila Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Terima kasih. Hormat kami, Tim Hukum Nadi.

Terima kasih, Yang Mulia.

### 435. KETUA: SALDI ISRA [54:18]

Oke, berapa kecamatan di Batam Kota ini?

## 436. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 169/PHPU.WAKO-XXIII/2025: ERIK SETIAWAN [54:24]

Di (...)

## 437. KETUA: SALDI ISRA [54:27]

Berapa jumlah kecamatan di Kota Batam ini?

# 438. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 169/PHPU.WAKO-XXIII/2025: ERIK SETIAWAN [54:28]

12, Yang Mulia.

### 439. KETUA: SALDI ISRA [54:29]

12, berarti ada 4 yang tidak perlu PSU, ya?

## 440. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 169/PHPU.WAKO-XXIII/2025: ERIK SETIAWAN [54:32]

Ya, Yang Mulia, benar.

### 441. KETUA: SALDI ISRA [54:32]

Oke pengetahuan-pengetahuan umum standar saja itu. Ada yang mau ditambahkan, Yang Mulia Pak Ridwan? Silakan.

### 442. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [54:44]

Ya, terima kasih, Yang Mulia Ketua.

Saudara Kuasa Pemohon, ya. Ini TSM ya, banyak sekali ini Saudara sampaikan di dalam dalil Saudara ini mengenai terstruktur, sistematis, meluas itu, ya, masif yang Saudara sebutkan.

Nah, tadi kan sudah juga sedikit Saudara menjelaskan, ada beberapa laporan yang Saudara sendiri, bahkan Saudara di sini, di ... dalilnya itu juga masyarakat juga menyampaikan, tidak kurang dari 10 laporan, satu laporan yang ditidak lanjut. Itu ada sudah Saudara, ya, buktinya ... sebagai bukti?

# 443. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 169/PHPU.WAKO-XXIII/2025: ERIK SETIAWAN [55:29]

Ada, Yang Mulia.

### 444. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [55:29]

(Ucapan tidak terdengar jelas) satu itu?

## 445. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 169/PHPU.WAKO-XXIII/2025: ERIK SETIAWAN [55:29]

Ada.

### 446. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [55:32]

Ada itu, yang benar ... yang ada juga beberapa dalil lain mengenai keterlibatan Anggota Polri misalnya. Dan juga banyak lagi yang Saudara sampaikan itu, pernah diteruskan ke pihak yang berwajib, ke Polri misalnya. Atau sedang proses sekarang ini misalnya?

## 447. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 169/PHPU.WAKO-XXIII/2025: ERIK SETIAWAN [55:50]

Izin, Yang Mulia. Terkait ketidaknetralan Polri, kita tidak akan ... tidak pernah memproses, Yang Mulia.

### 448. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [55:54]

Kenapa?

## 449. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 169/PHPU.WAKO-XXIII/2025: ERIK SETIAWAN [55:59]

Dari tim kita, sepakat untuk tidak memproses terlebih dahulu, kecuali (...)

#### 450. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [56:02]

Tapi ini masukkan ke dalam ini permohonan?

## 451. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 169/PHPU.WAKO-XXIII/2025: ERIK SETIAWAN [56:04]

Ya, Yang Mulia.

### 452. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [56:05]

Ya, baik. Tidak ada itu, ya. Tidak ada putusan ataupun proses sekarang pada sampai saat ini misalnya karena waktunya kan masih dekat.

## 453. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 169/PHPU.WAKO-XXIII/2025: ERIK SETIAWAN [56:13]

Izin, tidak ada, Yang Mulia.

### 454. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [56:14]

Tidak ada, ya. Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

### 455. KETUA: SALDI ISRA [56:17]

Oke, Yang Mulia Pak Ridwan. Yang Mulia Pak Arsul? Cukup, ya. Lanjut. Sekarang ke Perkara 151 Kabupaten Tapanuli Tengah. Silakan, Kuasa Hukumnya! Poin-poinnya saja, ini kita sudah baca semua. Sudah melakukan gelar perkara, sudah ada telah terhadap permohonan ini. Jadi sudah lengkap ini yang dibaca Hakim.

Silakan!

## 456. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 151/PHPU.BUP-XXIII/2025: GUNTUR RAMBE [56:48]

Terima kasih, Yang Mulia.

Izinkan kami Kuasa Hukum Perkara Nomor 151 Kabupaten Tapanuli Tengah atas nama Calon Bupati Khairul Kiyedi Pasaribu dan Darwin Sitompul masing-masing sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2024, Nomor Urut 1. Berdasarkan Surat Kuasa 6 Desember, memberikan kuasa kepada kami tim, yang hadir pada persidangan ini Adi Mansar dan Guntur Rambe.

Tentang Kewenangan Mahkamah, dianggap sudah dibacakan.

Kemudian tentang pengajuan permohonan, dianggap sudah dibacakan, sudah tertetra dalam Permohonan kami.

Kemudian Kedudukan Hukum. Bahwa Pemohon dalam hal ini adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2024.

Nah, berdasarkan Data Badan Pusat Statistik Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2023, penduduk Kabupaten Tapanuli Tengah berjumlah 3.886[sic!] (...)

### 457. KETUA: SALDI ISRA [58:01]

Berapa jumlah penduduknya?

## 458. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 151/PHPU.BUP-XXIII/2025: GUNTUR RAMBE [58:02]

386.895 jiwa, Yang Mulia.

#### 459. KETUA: SALDI ISRA [58:06]

386.895 jiwa, ya?

## 460. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 151/PHPU.BUP-XXIII/2025: GUNTUR RAMBE [58:10]

Ya, Yang Mulia.

### 461. KETUA: SALDI ISRA [58:12]

Kita kalau angkanya sudah banyak itu menyebutnya saja susah kita. Bagaimana mau jadi orang kaya itu, menyebut enam angka saja susah kita.

# 462. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 151/PHPU.BUP-XXIII/2025: GUNTUR RAMBE [58:17]

Siap, Yang Mulia.

#### 463. KETUA: SALDI ISRA [58:19]

Silakan.

# 464. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 151/PHPU.BUP-XXIII/2025: GUNTUR RAMBE [58:20]

Terima kasih, Yang Mulia.

Lanjut. Nah, dari Pasal 158, kami Pemohon tidak bisa mencapai angka 1,5%. Namun, dalam perolehan (...)

### 465. KETUA: SALDI ISRA [58:33]

Lewat ambang batas, ya? Lewat ambang batas, ya?

## 466. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 151/PHPU.BUP-XXIII/2025: GUNTUR RAMBE [58:35]

Ya, Yang Mulia.

### 467. KETUA: SALDI ISRA [58:36]

Itu pasangan calon yang Anda jadi prinsipal ... Prinsipal Anda berapa dapat suara?

# 468. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 151/PHPU.BUP-XXIII/2025: GUNTUR RAMBE [58:42]

Kalau Prinsipal mendapat suara 7 ... 74.208. Sementara Pihak Terkait 87 (...)

### 469. KETUA: SALDI ISRA [58:51]

774 ... sebe ... sabar.

# 470. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 151/PHPU.BUP-XXIII/2025: GUNTUR RAMBE [58:51]

Siap.

### 471. KETUA: SALDI ISRA [58:52]

Pelan-pelan, Pak.

## 472. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 151/PHPU.BUP-XXIII/2025: GUNTUR RAMBE [58:53]

Siap, Yang Mulia.

### 473. KETUA: SALDI ISRA [58:53]

Lawyer itu modalnya, Pak, yang paling pertama itu harus ngomongnya jelas sama orang.

Nah, berapa dapat suara, Pak ... Prinsipal Saudara?

# 474. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 151/PHPU.BUP-XXIII/2025: GUNTUR RAMBE [59:02]

Pemohon=74.208

## 475. KETUA: SALDI ISRA [59:06]

Oke, 74.208. Terkait?

## 476. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 151/PHPU.BUP-XXIII/2025: GUNTUR RAMBE [59:08]

Kemudian Pihak Pemenang=87.095.

### 477. KETUA: SALDI ISRA [59:12]

87.095 oke.

## 478. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 151/PHPU.BUP-XXIII/2025: GUNTUR RAMBE [59:14]

Kami lanjut, Yang Mulia.

### 479. KETUA: SALDI ISRA [59:15]

Jadi dua pasangan calon di sini, ya?

# 480. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 151/PHPU.BUP-XXIII/2025: GUNTUR RAMBE [59:17]

Siap, Yang Mulia.

#### 481. KETUA: SALDI ISRA [59:18]

Oke, lanjut.

## 482. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 151/PHPU.BUP-XXIII/2025: GUNTUR RAMBE [59:20]

Selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 2 di atas dikarenakan antara lain, terdapat pelanggaran-pelanggaran yang bersifat struktur, sistematis, dan masif berupa pelanggaran administrasi berkaitan dengan persyaratan dukungan partai politik yang telah mencalonkan Pemohon, namun mencalonkan Pemohon Pasangan Calon Nomor 2 kembali.

Kemudian tidak netralnya Pejabat Bupati Kabupaten Tapanuli Tengah. Kemudian tidak netralnya ASN yang berpihak pada Pasangan Calon Nomor Urut 2. Kemudian melibatkan Kepala Desa dan PKPPS[sic!]. Uraian tentang itu, Yang Mulia, ada di poin 8 sampai dengan 9 dari legal standing.

Nah, dari kesimpulan legal standing ini, kami berharap ... kami berkeyakinan menurut Pemohon bahwa kami dapat mengajukan Permohonan ini berdasarkan pelanggaran-pelanggaran yang sifatnya TSM.

### 483. KETUA: SALDI ISRA [01:00:19]

Oke, lanjut!

# 484. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 151/PHPU.BUP-XXIII/2025: GUNTUR RAMBE [01:00:20]

Lanjut kepada Pokok Permohonan, Yang Mulia, tentang pelanggaran (...)

### 485. KETUA: SALDI ISRA [01:00:23]

Jadi, intinya Saudara mengatakan 158 itu harus dikesampingkan dulu, ya? Karena ada TSM.

## 486. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 151/PHPU.BUP-XXIII/2025: GUNTUR RAMBE [01:00:27]

Siap, Yang Mulia.

### 487. KETUA: SALDI ISRA [01:00:28]

Mana TSM-nya itu? Coba ceritakan sekarang!

## 488. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 151/PHPU.BUP-XXIII/2025: GUNTUR RAMBE [01:00:31]

Baik. Pokok Permohonan tentang pelanggaran administrasi pendaftaran calon oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah.

#### 489. KETUA: SALDI ISRA [01:00:39]

Ya.

# 490. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 151/PHPU.BUP-XXIII/2025: GUNTUR RAMBE [01:00:39]

Pada awalnya, Prinsipal telah didukung oleh 9 partai politik dan telah dinyatakan memenuhi syarat.

### 491. KETUA: SALDI ISRA [01:00:47]

Oke.

# 492. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 151/PHPU.BUP-XXIII/2025: GUNTUR RAMBE [01:00:47]

Untuk mendaftarkan diri sebagai calon bupati dan wakil bupati.

### 493. KETUA: SALDI ISRA [01:00:52]

9 partai politik pada awalnya, ya?

# 494. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 151/PHPU.BUP-XXIII/2025: GUNTUR RAMBE [01:00:53]

Ya, Yang Mulia.

## 495. KETUA: SALDI ISRA [01:00:54]

Jadi, pada awalnya rencananya mau satu pasang calon saja ini?

# 496. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 151/PHPU.BUP-XXIII/2025: GUNTUR RAMBE [01:01:00]

Benar, Yang Mulia.

### 497. KETUA: SALDI ISRA [01:00:59]

Oke, terus?

## 498. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 151/PHPU.BUP-XXIII/2025: GUNTUR RAMBE [01:01:02]

Nah, kemudian, itu tertera di Pokok Permohonan poin 5, Yang Mulia.

#### 499. KETUA: SALDI ISRA [01:01:08]

Ya.

## 500. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 151/PHPU.BUP-XXIII/2025: GUNTUR RAMBE [01:01:09]

Bahwa permasalahan muncul pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Tengah Tahun 2024, manakala Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia menerbitkan surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 2038/PL.02.2-SD/06/2024 Perihal penerimaan kembali pendaftaran pasangan calon pada daerah dengan satu pasangan calon pada tanggal 11 September 2024. Bukti P-6, Yang Mulia.

### 501. KETUA: SALDI ISRA [01:01:43]

Oke.

## 502. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 151/PHPU.BUP-XXIII/2025: GUNTUR RAMBE [01:01:43]

Nah, uraian tentang ini telah kami uraikan sampai kepada poin 11, Yang Mulia.

### 503. KETUA: SALDI ISRA [01:01:53]

Oke, jadi ini karena ini satu, dibuka lagi kan diperpanjang, memang begitu aturannya kan?

# 504. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 151/PHPU.BUP-XXIII/2025: GUNTUR RAMBE [01:01:58]

Ya, Yang Mulia.

### 505. KETUA: SALDI ISRA [01:01:59]

Begitu dibuka, diperpanjang, masuk calon baru?

## 506. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 151/PHPU.BUP-XXIII/2025: GUNTUR RAMBE [01:02:03]

Masuk calon baru.

### 507. KETUA: SALDI ISRA [01:02:02]

Keluar satu partai dari situ?

## 508. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 151/PHPU.BUP-XXIII/2025: GUNTUR RAMBE [01:02:04]

Ya, untuk mendukung calon baru tersebut.

### 509. KETUA: SALDI ISRA [01:02:06]

Oke, lanjut!

# 510. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 151/PHPU.BUP-XXIII/2025: GUNTUR RAMBE [01:02:09]

Ya, kemudian di poin nomor (ucapan tidak terdengar jelas), Pokok Permohonan bahwa ketentuan Pasal 100 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 di atas menegaskan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang telah mengajukan Permohonan sebagai calon bupati dan wakil bupati tidak dapat menarik pengusulannya sejak pendaftaran, Yang Mulia.

Itu ... pedaga ... yang menurut kami Pemohon merupakan ... pe ... tidak memenuhi persyaratan untuk dijadikan sebagai Calon Bupati Tapanuli Tengah.

## 511. KETUA: SALDI ISRA [01:02:43]

Oke, itu selesai ya, di poin itu, ya?

# 512. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 151/PHPU.BUP-XXIII/2025: GUNTUR RAMBE [01:02:45]

Ya, Yang Mulia.

### 513. KETUA: SALDI ISRA [01:02:49]

Pokok yang pertama ini tidak memenuhi persyaratan, karena apa? Dia sudah masuk gerombolan 9 partai, kelompok 9 partai, tiba-tiba keluarm diterima sebagai pasangan calon? Oke.

# 514. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 151/PHPU.BUP-XXIII/2025: GUNTUR RAMBE [01:02:56]

Oke.

### 515. KETUA: SALDI ISRA [01:02:56]

Lanjut poin berikut!

## 516. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 151/PHPU.BUP-XXIII/2025: GUNTUR RAMBE [01:02:58]

Dilanjutkan teman saya, Yang Mulia. Tentang keterlibatan pejabat bupati.

### 517. KETUA: SALDI ISRA [01:03:03]

Oke, silakan!

# 518. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 151/PHPU.BUP-XXIII/2025: ADI MANSAR [01:03:02]

Izin, Majelis (...)

### 519. KETUA: SALDI ISRA [01:03:03]

Ini karena menerima honornya bareng-bareng, menyampaikannya bareng-bareng juga, jangan sendiri-sendiri!

## 520. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 151/PHPU.BUP-XXIII/2025: ADI MANSAR [01:03:09]

Ya, karena gurunya, Yang Mulia, kali.

### 521. KETUA: SALDI ISRA [01:03:14]

Silakan!

# 522. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 151/PHPU.BUP-XXIII/2025: ADI MANSAR [01:03:12]

Izin, Prof. Ini tentang keterlibatan pejabat bupati, Sekda, ASN, kepala desa di Kabupaten Tapanuli Tengah yang menguntungkan salah satu pasangan calon.

#### 523. KETUA: SALDI ISRA [01:03:29]

Oke.

# 524. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 151/PHPU.BUP-XXIII/2025: ADI MANSAR [01:03:34]

Dimana Pilkada Kabupaten Tapanuli Tengah tidak berjalan secara jujur dan adil karena Kabupaten Tapanuli Tengah itu untuk sementara

dipimpin oleh Pj Bupati, itu sudah kami buat dalam Bukti P-11 dan bukti P-11A.

### 525. KETUA: SALDI ISRA [01:03:51]

Oke.

## 526. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 151/PHPU.BUP-XXIII/2025: ADI MANSAR [01:03:51]

Ya, kami lanjutkan, Yang Mulia.

### 527. KETUA: SALDI ISRA [01:03:54]

Ya.

## 528. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 151/PHPU.BUP-XXIII/2025: ADI MANSAR [01:03:51]

Keter ... baik keterkaitan antara Pj dan ASN tadi kami buat, mulai dari B-1 sampai dengan B-10, Yang Mulia.

### 529. KETUA: SALDI ISRA [01:04:05]

Oke.

# 530. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR PERKARA 151/PHPU.BUP-XXIII/2025: ADI MANSAR [01:04:06]

Ya. Sekarang kami masuk ke poin c.

#### 531. KETUA: SALDI ISRA [01:04:09]

Poin c.

# 532. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR PERKARA 151/PHPU.BUP-XXIII/2025: ADI MANSAR [01:04:09]

Di sini tentang dugaan keterlibatan penyelenggara pemilihan secara masif pada Pilkada Kabupaten Tapanuli Tengah.

#### 533. KETUA: SALDI ISRA [01:04:17]

Ini penyelenggara ini, KPU dan Bawaslu, ya?

## 534. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR PERKARA 151/PHPU.BUP-XXIII/2025: ADI MANSAR [01:04:19]

KPU dan Bawaslu, Yang Mulia.

### 535. KETUA: SALDI ISRA [01:04:20]

Ya, ini. KPU, Bawaslu, itu tolong dicatat, itu.

# 536. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR PERKARA 151/PHPU.BUP-XXIII/2025: ADI MANSAR [01:04:21]

Ya, ya.

### 537. KETUA: SALDI ISRA [01:04:24]

Banyak sekali itu, dengerin itu, KPU, Bawaslu sekarang, ya. Silakan.

# 538. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR PERKARA 151/PHPU.BUP-XXIII/2025: ADI MANSAR [01:04:27]

Siap, Yang Mulia.

Bahwa Pemohon percaya setiap tahapan pilkada dipantau oleh masyarakat Tapanuli Tengah, khususnya, dan masyarakat Indonesia umumnya, apalagi oleh undang-undang menetapkan lembaga khusus seperti Bawaslu.

### 539. KETUA: SALDI ISRA [01:04:43]

Ya, yang itunya enggak penting.

### 540. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR PERKARA 151/PHPU.BUP-XXIII/2025: ADI MANSAR [01:04:43]

Ya.

### 541. KETUA: SALDI ISRA [01:04:44]

Apa bentuk keberpihakannya, itu?

# 542. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR PERKARA 151/PHPU.BUP-XXIII/2025: ADI MANSAR [01:04:46]

Nah, pada bagian C tadi, di poin 3, Yang Mulia.

### 543. KETUA: SALDI ISRA [01:04:54]

Ya.

## 544. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR PERKARA 151/PHPU.BUP-XXIII/2025: ADI MANSAR [01:04:54]

Ya. Kami mendalilkan bahwa ada salah seorang Komisioner Bawaslu, itu ada hubungan kekerabatan keluarga dengan salah satu pasangan calon.

### 545. KETUA: SALDI ISRA [01:05:12]

Pasangan calon, nomor?

## 546. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR PERKARA 151/PHPU.BUP-XXIII/2025: ADI MANSAR [01:05:13]

Pasangan Calon Nomor Urut 2.

### 547. KETUA: SALDI ISRA [01:05:15]

Siapa itu? Kan dua itu, orangnya.

# 548. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR PERKARA 151/PHPU.BUP-XXIII/2025: ADI MANSAR [01:05:17]

Pasangan Calon Nomor Urut 2, itu Saudara Masinton Pasaribu dan Mahmud Effendi, disingkat MAMA kalau di (...)

### 549. KETUA: SALDI ISRA [01:05:27]

Oke.

# 550. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR PERKARA 151/PHPU.BUP-XXIII/2025: ADI MANSAR [01:05:27]

Ya.

### 551. KETUA: SALDI ISRA [01:05:29]

Jadi dia berhubungan, ada kekerabatan itu dengan siapa ang ... anggota Bawaslunya?

## 552. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR PERKARA 151/PHPU.BUP-XXIII/2025: ADI MANSAR [01:05:34]

Komisioner Bawaslunya, ada hubungan kekerabatan dengan calon bupati terpilih. Dalam hal ini, Masinton Pasaribu.

### 553. KETUA: SALDI ISRA [01:05:42]

Yang saya tanya, Nama Anggota Bawaslunya siapa, Pak?

## 554. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR PERKARA 151/PHPU.BUP-XXIII/2025: ADI MANSAR [01:05:45]

Romi, Yang Mulia. Kami jelaskan.

### 555. KETUA: SALDI ISRA [01:05:46]

Nah, itu. Bapak menyebut nama saja takut, gimana mau memperjuangkan yang benar?

### 556. KETUA: SALDI ISRA [01:05:50]

Oh tidak, Yang Mulia. Kami sudah jelaskan di sini, Yang Mulia.

#### 557. KETUA: SALDI ISRA [01:05:52]

Silakan.

## 558. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR PERKARA 151/PHPU.BUP-XXIII/2025: ADI MANSAR [01:05:54]

Ya. Dan kemudian, itu terjadi di (...)

### 559. KETUA: SALDI ISRA [01:06:02]

TPS 03?

# 560. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR PERKARA 151/PHPU.BUP-XXIII/2025: ADI MANSAR [01:06:04]

Beberapa TPS, Yang Mulia.

### 561. KETUA: SALDI ISRA [01:06:06]

Apa yang dilakukan, Romi ini? Yang menunjukkan bahwa dia berpihak kepada Mansinton, itu?

## 562. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR PERKARA 151/PHPU.BUP-XXIII/2025: ADI MANSAR [01:06:11]

Jadi, yang pertama, kami memang pada Bukti P-10 sampai 10 ... DP-19[sic!] itu, Pemohon itu banyak membuat laporan, tetapi tidak satu pun yang ditindaklanjuti. Itu satu, Yang Mulia.

### 563. KETUA: SALDI ISRA [01:06:28]

Oke, satu. Apa lagi?

## 564. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR PERKARA 151/PHPU.BUP-XXIII/2025: ADI MANSAR [01:06:29]

Kemudian sebelumnya, Pemohon itu mengajukan keberatan yang berkaitan dengan administrasi tadi.

### 565. KETUA: SALDI ISRA [01:06:36]

Ya.

# 566. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR PERKARA 151/PHPU.BUP-XXIII/2025: ADI MANSAR [01:06:36]

Ya, dan itu tidak digubris sama sekali, malah dikasih surat, dan suratnya itu juga men-tweet pasal yang keliru.

### 567. KETUA: SALDI ISRA [01:06:44]

Oke.

## 568. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR PERKARA 151/PHPU.BUP-XXIII/2025: ADI MANSAR [01:06:44]

Ya.

#### 569. KETUA: SALDI ISRA [01:06:45]

Kalau itu kan, sudah selesai tadi, di depan.

## 570. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR PERKARA 151/PHPU.BUP-XXIII/2025: ADI MANSAR [01:06:47]

Ya, siap, Yang Mulia.

### 571. KETUA: SALDI ISRA [01:06:48]

Apa lagi, buktinya?

# 572. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR PERKARA 151/PHPU.BUP-XXIII/2025: ADI MANSAR [01:06:50]

Nah, sekarang masuk ke poin yang lebih teknis, Yang Mulia.

### 573. KETUA: SALDI ISRA [01:06:54]

Ya, apa itu?

# 574. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR PERKARA 151/PHPU.BUP-XXIII/2025: ADI MANSAR [01:06:55]

Ya, Poin yang lebih teknis ini karena di Keca ... di Kabupaten Tapanuli Tengah ini terdapat 18 kecamatan. Kami mendalilkan ada 12 kecamatan itu terdapat pelanggaran yang terstruktur dan juga sistematis, dimana.

#### 575. KETUA: SALDI ISRA [01:07:17]

Kecamatan apa saja?

# 576. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR PERKARA 151/PHPU.BUP-XXIII/2025: ADI MANSAR [01:07:18]

Saya bacakan, Yang Mulia, kecamatannya, Kecamatan Badiri.

### 577. KETUA: SALDI ISRA [01:07:22]

Di mana, ini? Dalam permohonan bisa ditemukan?

## 578. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR PERKARA 151/PHPU.BUP-XXIII/2025: ADI MANSAR [01:07:24]

Di, sori, Yang Mulia, di halaman 20 mulai, Yang Mulia.

### 579. KETUA: SALDI ISRA [01:07:29]

Oke.

## 580. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR PERKARA 151/PHPU.BUP-XXIII/2025: ADI MANSAR [01:07:29]

Halaman 20, ya.

### 581. KETUA: SALDI ISRA [01:07:31]

Kecamatan Badiri. Apa lagi kecamatannya?

# 582. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR PERKARA 151/PHPU.BUP-XXIII/2025: ADI MANSAR [01:07:34]

Kecamatan Lumut.

### 583. KETUA: SALDI ISRA [01:07:35]

Lumut.

# 584. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR PERKARA 151/PHPU.BUP-XXIII/2025: ADI MANSAR [01:07:36]

Tukka, Sarudik.

### 585. KETUA: SALDI ISRA [01:07:38]

Oke.

## 586. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR PERKARA 151/PHPU.BUP-XXIII/2025: ADI MANSAR [01:07:39]

Sosorgadong.

#### 587. KETUA: SALDI ISRA [01:07:40]

Ya.

# 588. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR PERKARA 151/PHPU.BUP-XXIII/2025: ADI MANSAR [01:07:41]

Pandan.

589. KETUA: SALDI ISRA [01:07:41]

Ya.

590. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR PERKARA 151/PHPU.BUP-XXIII/2025: ADI MANSAR [01:07:43]

Andam Dewi.

591. KETUA: SALDI ISRA [01:07:43]

Ya.

592. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR PERKARA 151/PHPU.BUP-XXIII/2025: ADI MANSAR [01:07:44]

Pinangsori.

593. KETUA: SALDI ISRA [01:07:44]

Ya.

594. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR PERKARA 151/PHPU.BUP-XXIII/2025: ADI MANSAR [01:07:45]

Sorkam Barat.

595. KETUA: SALDI ISRA [01:07:45]

Ya.

596. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR PERKARA 151/PHPU.BUP-XXIII/2025: ADI MANSAR [01:07:49]

Kolang.

597. KETUA: SALDI ISRA [01:07:49]

Ya.

598. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR PERKARA 151/PHPU.BUP-XXIII/2025: ADI MANSAR [01:07:49]

Pasaribu Tobing.

### 599. KETUA: SALDI ISRA [01:07:49]

Ya.

## 600. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR PERKARA 151/PHPU.BUP-XXIII/2025: ADI MANSAR [01:07:50]

Dan Kecamatan Sorkam.

### 601. KETUA: SALDI ISRA [01:07:52]

Oke. Itu yang semuanya dibuktikan dengan Bukti P dan segala macam itu, ya?

## 602. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR PERKARA 151/PHPU.BUP-XXIII/2025: ADI MANSAR [01:07:56]

Benar, Yang Mulia. Itu terdapat di 56 desa dan 112 TPS, Yang Mulia.

### 603. KETUA: SALDI ISRA [01:08:03]

Oke. Nanti kita cek TPS-nya itu.

# 604. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 151/PHPU.BUP-XXIII/2025: ADI MANSAR [01:08:06]

Siap, Yang Mulia.

#### 605. KETUA: SALDI ISRA [01:08:06]

Apa lagi?

# 606. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 151/PHPU.BUP-XXIII/2025: ADI MANSAR [01:08:08]

Nah, itu yang berkaitan dengan terstruktur, sistematis, dan masif karena di situ terlibat ASN, kepala desa, kemudian perangkat-perangkat desa lainnya, Yang Mulia.

### 607. KETUA: SALDI ISRA [01:08:23]

Oke.

## 608. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 151/PHPU.BUP-XXIII/2025: ADI MANSAR [01:08:24]

Ya.

### 609. KETUA: SALDI ISRA [01:08:25]

Langsung, Petitum.

# 610. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 151/PHPU.BUP-XXIII/2025: ADI MANSAR [01:08:26]

Oke. Jadi, sebelum Petitum. Izin, Yang Mulia, di (...)

### 611. KETUA: SALDI ISRA [01:08:30]

Ya.

# 612. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 151/PHPU.BUP-XXIII/2025: ADI MANSAR [01:08:31]

Poin 19, halaman 25.

### 613. KETUA: SALDI ISRA [01:08:32]

Ya.

# 614. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 151/PHPU.BUP-XXIII/2025: ADI MANSAR [01:08:33]

Bahwa Pemohon sangat keberatan terhadap penetapan suara rekapitulasi akhir, tanggal 5 Desember 2024 yang ditetapkan oleh Termohon dengan perolehan akhir suara masing-masing pasangan calon. Tadi, seperti yang dibacakan, Nomor Urut 1=74.208, Nomor Urut 2=87.095.

#### 615. KETUA: SALDI ISRA [01:08:53]

Oke.

# 616. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 151/PHPU.BUP-XXIII/2025: ADI MANSAR [01:08:55]

Bahwa perolehan suara yang benar menurut Pemohon.

### 617. KETUA: SALDI ISRA [01:08:59]

Oke.

## 618. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 151/PHPU.BUP-XXIII/2025: ADI MANSAR [01:09:01]

Untuk Nomor Urut 1=74.208 dan untuk Nomor Urut 2=7.409.

### 619. KETUA: SALDI ISRA [01:09:08]

Oke. Jadi, semua akumulasi kecurangan tadi menurut Pemohon, itu jumlahnya 13.000?

## 620. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 151/PHPU.BUP-XXIII/2025: ADI MANSAR [01:09:14]

13.000.

### 621. KETUA: SALDI ISRA [01:09:15]

Sehingga harus dikurangi kepada peraih suara terbanyak?

# 622. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 151/PHPU.BUP-XXIII/2025: ADI MANSAR [01:09:17]

Ya.

### 623. KETUA: SALDI ISRA [01:09:19]

Kalau itu dikurangi, maka suara Pasangan Calon Anda itu 74.208, ya?

# 624. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 151/PHPU.BUP-XXIII/2025: ADI MANSAR [01:09:24]

Ya.

#### 625. KETUA: SALDI ISRA [01:09:25]

Sementara Pasangan Nomor 2=74.095?

626. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 151/PHPU.BUP-XXIII/2025: ADI MANSAR [01:09:28]

95[sic!].

627. KETUA: SALDI ISRA [01:09:29]

Menang tipis ini namanya.

628. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 151/PHPU.BUP-XXIII/2025: ADI MANSAR [01:09:30]

113, Yang Mulia.

629. KETUA: SALDI ISRA [01:09:32]

Ya. Beda-beda tipis.

630. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 151/PHPU.BUP-XXIII/2025: ADI MANSAR [01:09:34]

Beda-beda tipis, Yang Mulia.

631. KETUA: SALDI ISRA [01:09:34]

Langsung.

632. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 151/PHPU.BUP-XXIII/2025: ADI MANSAR [01:09:34]

Ya.

633. KETUA: SALDI ISRA [01:09:35]

Petitum.

634. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 151/PHPU.BUP-XXIII/2025: ADI MANSAR [01:09:36]

Izin, langsung Petitum, Yang Mulia.

635. KETUA: SALDI ISRA [01:09:38]

Ya.

## 636. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 151/PHPU.BUP-XXIII/2025: ADI MANSAR [01:09:39]

Poin yang pertama, mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

### 637. KETUA: SALDI ISRA [01:09:42]

Ya.

## 638. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 151/PHPU.BUP-XXIII/2025: ADI MANSAR [01:09:43]

Poin yang kedua, menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 1846 Tahun 2024, tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Tengah Tahun 2024, bertanggal 5 Desember 2024.

Menyatakan diskualifikasi dan/atau menyatakan tidak memenuhi syarat pencalonan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2, Masinton Pasaribu, Mahmud Efendi, dari kepesertaan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2024.

Empat, menyatakan Batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 1107 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Tengah Tahun 2024, bertanggal 22 September 2024 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 1108 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2024, bertanggal 23 September 2024 sepanjang mengenai Pasangan Calon Nomor Urut 2, Masinton Pasaribu, Mahmud Efendi.

Lima, memerintahkan Termohon untuk menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 1, Khairul Kiyedi Pasaribu, Darwin Sitompul sebagai Bupati dan Wakil Bupati terpilih dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2024.

Atau setidak-tidaknya memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah melaksanakan pemilihan ulang Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Tengah, yang diikuti oleh Pasangan Calon Khairul Kiyedi Pasaribu dan Darwin Sitompul tanpa diikuti oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2, Masinton Pasaribu, Mahmud Efendi.

Atau, mengabulkan Permohonan Pemohon.

Menyatakan Batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 1846 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2024 bertanggal 5 Desember 2024.

Menetapkan perolehan suara hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2024, yang benar menurut Pemohon adalah Paslon Nomor Urut 1, Khairul Kiyedi Pasaribu dan Darwin Sitompul memperoleh jumlah suara=74.208. Pasangan Nomor Urut 2, Masinton Pasaribu dan Mahmud Efendi=74.095.

Empat. Mewajibkan Termohon untuk menerbitkan keputusan yang menetapkan Pemohon sebagai peraih suara terbanyak dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2024, dengan rincian Khairul Kiyedi Pasaribu dan Darwin Sitompul=74.208, Masinton Pasaribu dan Mahmud Efendi=74.02[sic!] ... 095.

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Medan, 11 Desember 2024.

Izin, Yang Mulia.

### 639. KETUA: SALDI ISRA [01:13:07]

Ya.

## 640. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 151/PHPU.BUP-XXIII/2025: ADI MANSAR [01:12:07]

Sebelum ini, kami mohon ada sedikit renvoi.

#### 641. KETUA: SALDI ISRA [01:13:12]

Nah, ini, tidak ada lagi renvoi-merenvoi ini barang, ya. Jadi, sudah diumumkan tidak ada lagi perbaikan karena semua sudah dikasih waktu untuk melakukan perbaikan.

# 642. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 151/PHPU.BUP-XXIII/2025: ADI MANSAR [01:13:25]

Terima kasih, Yang Mulia. Saya kembalikan.

### 643. KETUA: SALDI ISRA [01:13:27]

Supaya ditegaskan ini, jangan kami yang jadi pusing nanti kalau dikasih sedikit, maunya tambah sedikit lagi, tambah sedikit, begitu.

Oke. Terima kasih. Jadi klir, ya, ini Permohonannya mohon dua alternatifnya. Satu didiskualifikasi, yang satu lagi ditetapkan pasangan calon pemenangnya, gitu.

Ada yang mau ditambahkan? Pak Arsul, silakan.

### 644. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:13:53]

Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua Panel. Ini Pemohon, ya?

## 645. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 151/PHPU.BUP-XXIII/2025: ADI MANSAR [01:13:57]

Siap, Yang Mulia.

### 646. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:13:58]

Kalau mengikuti tadi, kronologi yang ... apa ... Kuasa Pemohon sampaikan, ini kan tadinya Pilkada-nya atau Pilbub-nya ini kan, akan calon tunggal, gitu ya, lawan kotak kotong ... kosong. Ini gara-gara Putusan MK Nomor 60 gitu, ya, 2024 maka batal lah itu, ya, calon tunggal itu. Nah, tiba-tiba datang ini Pak Masinton ke Tapanuli Tengah, gitu ya. Kalau saya lihat ini, Pak Khairul dan Pak Masinton ini sama-sama Pasaribu (...)

## 647. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 151/PHPU.BUP-XXIII/2025: ADI MANSAR [01:14:34]

Benar, Yang Mulia.

### 648. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:14:34]

Ini sama-sama halak kita ini.

# 649. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 151/PHPU.BUP-XXIII/2025: ADI MANSAR [01:14:35]

Benar.

### 650. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:14:35]

Enggak bisa damai saja, ini? Itu.

Oke. Saya pertama ingin ... apa ... klarifikasi dulu. Ini kan tadinya, partai pengusungnya Pak Masinton ini sudah memberikan dukungan kepada Pak Khairul (...)

# 651. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 151/PHPU.BUP-XXIII/2025: ADI MANSAR [01:14:56]

Kiyedi.

### 652. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:14:56]

Ya. Pak Khairul Kiyedi, ya. Nah kemudian ... apa ... dicabut lah, begitu. Itu Paslon Anda pernah melakukan upaya apa? Terhadap pencabutan itu?

# 653. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 151/PHPU.BUP-XXIII/2025: ADI MANSAR [01:15:11]

Jadi, yang pertama, kami melaporkan itu ke Bawaslu kabupaten.

### 654. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:15:15]

Oke. Ya.

## 655. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 151/PHPU.BUP-XXIII/2025: ADI MANSAR [01:15:16]

Karena tidak diproses (...)

### **656. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:15:18]**

Ya.

# 657. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 151/PHPU.BUP-XXIII/2025: ADI MANSAR [01:15:18]

Tetapi keluar secarik kertas yang mengatakan tidak ada kerugian.

#### 658. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:15:23]

Oke.

### 659. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 151/PHPU.BUP-XXIII/2025: ADI MANSAR [01:15:24]

Sementara menurut paslon kami karena memang (...)

#### 660. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:15:27]

Ya.

## 661. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 151/PHPU.BUP-XXIII/2025: ADI MANSAR [01:15:27]

PDI Perjuangan itu sudah masuk di koalisi (...)

### 662. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:15:29]

Oke. Oke.

# 663. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 151/PHPU.BUP-XXIII/2025: ADI MANSAR [01:15:31]

Dan dinyatakan MS (...)

### 664. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:15:33]

Setelah ... setelah Bawaslu seperti itu, apa lagi yang Anda lakukan?

# 665. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 151/PHPU.BUP-XXIII/2025: ADI MANSAR [01:15:37]

Upaya lain pada saat itu, dicoba untuk mengajukan ke pengadilan tata usaha ... Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, Yang Mulia (...)

### 666. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:15:45]

Ya. Terus apa? Putusannya?

## 667. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 151/PHPU.BUP-XXIII/2025: ADI MANSAR [01:15:48]

Nah, oleh ... oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara tetap mengatakan tidak ada kerugian langsung atau nyata, Yang Mulia.

### 668. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:15:54]

Oh, begitu.

### 669. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 151/PHPU.BUP-XXIII/2025: ADI MANSAR [01:15:55]

Ya.

### 670. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:15:56]

Ya.

671. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 151/PHPU.BUP-XXIII/2025: ADI MANSAR [01:15:56]

Artinya (...)

672. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:15:57]

Itu nanti jadi bukti, enggak?

673. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 151/PHPU.BUP-XXIII/2025: ADI MANSAR [01:15:58]

Jadi bukti, Yang Mulia.

674. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:15:59]

Oke.

675. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 151/PHPU.BUP-XXIII/2025: ADI MANSAR [01:15:59]

Ya.

676. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:16:00]

Baik tu dulu, jangan diulas. Saya cuma ingin tahu (...)

677. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 151/PHPU.BUP-XXIII/2025: ADI MANSAR [01:16:03]

Siap (...)

678. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:16:03]

Yang sudah Anda lakukan.

Nah, yang kedua, ini kan Anda minta ya, atau Pemohon minta, ini suara Paslon 02 ini dikorting 13.000 kan begitu, ya?

## 679. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 151/PHPU.BUP-XXIII/2025: ADI MANSAR [01:16:17]

Siap, Yang Mulia.

### **680. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:16:17]**

Ya, itu. Ini dapet angka 13.000 dari mana ini?

# 681. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 151/PHPU.BUP-XXIII/2025: ADI MANSAR [01:16:23]

Ada 112 TPS, Yang Mulia. Di mana di beberapa TPS itu absensinya misalnya jumlahnya 112 orang. Tapi peser ... suara sahnya itu melebihi dari jumlah peserta yang hadir, itu satu, Yang Mulia, ya.

### 682. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:16:44]

Kenapa enggak Anda uraikan di TPS ini, TPS ini, sehingga sampai ketemu angka 13.000? Kalau ini kan, Anda pakai kata pantas dikurangi 13.000 kan, gitu pakai kata pantas dilakukan pembatalan di seluruh TPS yang terdapat pengelembungan, suara yang jumlahnya lebih dari 13 ribu, lebih di situ. Tapi Anda minta kortingnya, saya enggak tahu lebihnya berapa, tapi Anda minta kortingnya cuma 13.000, gitu.

# 683. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 151/PHPU.BUP-XXIII/2025: ADI MANSAR [01:17:01]

Ya, Yang Mulia. Karena kita berani memintanya sesuai dengan bukti yang ada (...)

### 684. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:17:13]

Oh yang ... oh begitu (...)

# 685. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 151/PHPU.BUP-XXIII/2025: ADI MANSAR [01:17:13]

Ya (...)

### 686. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:17:13]

Ya, silakan nanti Anda buktikan, ya. Saya cuma mau tanya itu saja (...)

## 687. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 151/PHPU.BUP-XXIII/2025: ADI MANSAR [01:17:18]

Siap, Yang Mulia.

### **688. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:17:19]**

Terima kasih.

### 689. KETUA: SALDI ISRA [01:17:23]

Yang Mulia ... Yang Mulia Pak Ridwan.

### 690. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [01:17:23]

Cukup.

### 691. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:17:23]

Cukup, ya? Oke, terima kasih untuk Tapanuli Tengah.
Oh, ini orang-orang kaya saja ini, ini satu Masinton Pasaribu, ini satu lagi Pasaribu, pasarnya saja seribu jumlahnya.
Lanjutnya Perkara 152, Deli Serdang.

# 692. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 152/PHPU.BUP-XXIII/2025: PAUJIAH HANUM [01:17:45]

Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih (...)

#### 693. KETUA: SALDI ISRA [01:17:46]

Ini permohonannya enggak ada perbaikan Bu, ya, permohonan pertama tanpa perbaikan, ya?

# 694. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 152/PHPU.BUP-XXIII/2025: PAUJIAH HANUM [01:17:51]

Tidak ada.

### 695. KETUA: SALDI ISRA [01:17:52]

Oke, silakan.

## 696. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 152/PHPU.BUP-XXIII/2025: PAUJIAH HANUM [01:17:52]

Terima kasih, Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi.

Yang telah memberikan kesempatan kepada kami selaku Pemohon Perkara 152 Kuasa Hukum dari Pasangan Calon Nomor Urut 3, Bapak H. M. Ali Yusuf Siregar dan Bapak Bayu Sumantri Agung, sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deli Serdang.

Bahwa objek permohonan yang kami ajukan adalah terkait keputusan dari KPU Kabupaten Deli Serdang, Nomor 3098 Tahun 2024 tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang Tahun 2024.

Bahwa terkait Kewenangan Mahkamah Konstitusi, mohon dianggap dibacakan, Yang Mulia.

### 697. KETUA: SALDI ISRA [01:18:40]

Ya.

## 698. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 152/PHPU.BUP-XXIII/2025: PAUJIAH HANUM [01:18:42]

Bahwa terkait tenggang waktu, mohon dianggap dibacakan, Yang Mulia.

### 699. KETUA: SALDI ISRA [01:18:44]

Memenuhi, ya.

## 700. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 152/PHPU.BUP-XXIII/2025: PAUJIAH HANUM [01:18:47]

Bahwa terkait Kedudukan Hukum Pemohon juga, mohon dianggap dibacakan, Yang Mulia.

### 701. KETUA: SALDI ISRA [01:18:52]

Ya.

## 702. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 152/PHPU.BUP-XXIII/2025PAUJIAH HANUM [01:18:53]

Bahwa terkait pokok (...)

### 703. KETUA: SALDI ISRA [01:18:55]

Ini berapa selisih suaranya Bu?

# 704. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 152/PHPU.BUP-XXIII/2025: PAUJIAH HANUM [01:18:56]

Selisih suaranya 90 ... 5 ribu (...)

### 705. KETUA: SALDI ISRA [01:18:03]

95.000, ya?

## 706. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 152/PHPU.BUP-XXIII/2025: PAUJIAH HANUM [01:18:04]

90.546.

### 707. KETUA: SALDI ISRA [01:18:06]

Oke.

# 708. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 152/PHPU.BUP-XXIII/2025: PAUJIAH HANUM [01:18:09]

Bahwa ter (...)

### 709. KETUA: SALDI ISRA [01:18:09]

Ini tidak, se ... kalau baca undang-undangnya tidak melewati 158, tapi ... apa ... Pemohon mendalilkan ada pelanggaran TSM.

# 710. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 152/PHPU.BUP-XXIII/2025: PAUJIAH HANUM [01:18:17]

Siap.

### 711. KETUA: SALDI ISRA [01:18:17]

Nah, di mana itu TSM nya, Bu? Silakan.

## 712. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 152/PHPU.BUP-XXIII/2025: PAUJIAH HANUM [01:18:20]

Baik. Terkait pokok permohonan kami yang pertama, yaitu terkait pelanggaran secara terstruktur, sisematis, dan masif, ini sudah kita dalilkan dan juga kita sudah penuhi dengan alat bukti, Yang Mulia. Untuk TSM-nya, alat buktinya dari P-5 sampai dengan P-22, dalilnya pada halaman 15, Yang Mulia.

### 713. KETUA: SALDI ISRA [01:18:45]

Oke, 15 sampai 19?

## 714. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 152/PHPU.BUP-XXIII/2025: PAUJIAH HANUM [01:18:51]

Ya.

### 715. KETUA: SALDI ISRA [01:18:51]

Oke, lanjut. Apa lagi? Ini soal TSM nya, ya?

# 716. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 152/PHPU.BUP-XXIII/2025: PAUJIAH HANUM [01:18:55]

Ya, untuk TSM-nya (...)

### 717. KETUA: SALDI ISRA [01:18:57]

Yang kedua ini soal hujan (...)

## 718. UASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 152/PHPU.BUP-XXIII/2025: PAUJIAH HANUM [01:18:57]

Ya.

#### 719. KETUA: SALDI ISRA [01:18:58]

Soal banjir (...)

# 720. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 152/PHPU.BUP-XXIII/2025: PAUJIAH HANUM [01:18:58]

Ya (...)

### 721. KETUA: SALDI ISRA [01:18:59]

Silakan!

# 722. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 152/PHPU.BUP-XXIII/2025: PAUJIAH HANUM [01:20:02]

Yang kedua, terkait terjadinya bencana alam di Kabupaten Deli Serdang, sehingga me ... me ... membuat para pemilih tidak bisa hadir dikarenakan banyaknya ... terjadinya bencana banjir, longsor, tanggul jebol, sungai meluap, dan terputusnya jalan antardesa, dan ini juga kita jadikan bukti tambahan sesuai surat penjelasan BMKG ... BMKG Sumut, Yang Mulia.

### 723. KETUA: SALDI ISRA [01:20:28]

Oke.

# 724. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 152/PHPU.BUP-XXIII/2025: PAUJIAH HANUM [01:20:31]

Bahwa terkait dengan Petitum, Pemohon memohon kepada Mahkamah (...)

#### 725. KETUA: SALDI ISRA [01:20:35]

Jadi sebentar, Bu.

## 726. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 152/PHPU.BUP-XXIII/2025: PAUJIAH HANUM [01:20:36]

Siap.

### 727. KETUA: SALDI ISRA [01:20:36]

Ini soal karena adanya kondisi bencana alam itu, sehingga orang menjadi sulit keluar rumah dan ternyata yang hadir hanya 32%, ya?

## 728. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 152/PHPU.BUP-XXIII/2025: PAUJIAH HANUM [01:20:47]

Siap, Yang Mulia.

### 729. KETUA: SALDI ISRA [01:20:47]

Menggunakan hak (...)

## 730. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 152/PHPU.BUP-XXIII/2025: PAUJIAH HANUM [01:20:49]

Yang menggunakan hak pilih.

### 731. KETUA: SALDI ISRA [01:20:51]

Menggunakan hak pilih, betul mana ini KPU, apa? Betul ya, Bu ya, 32%?

Oke, jadi ini ... sehingga merugikan ya, Ibu. Kalau hadir lebih banyak, mungkin suaranya akan lebih banyak.

## 732. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 152/PHPU.BUP-XXIII/2025: PAUJIAH HANUM [01:21:03]

Insya Allah, Yang Mulia.

### 733. KETUA: SALDI ISRA [01:21:03]

Silakan, Bu. Langsung ke Petitum.

# 734. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 152/PHPU.BUP-XXIII/2025: PAUJIAH HANUM [01:21:07]

Ya.

### 735. KETUA: SALDI ISRA [01:21:07]

Silakan.

# 736. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 152/PHPU.BUP-XXIII/2025: PAUJIAH HANUM [01:21:12]

Bahwa terkait Petitum.

Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

- 1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
- 2. Membatalkan keputusan KPU Kabupaten Deli Serdang Nomor 3098 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang Tahun 2024, tertanggal 6 Desember 2024, pukul 15.04 WIB.

- 3. Memerintahkan KPU Kabupaten Deli Serdang untuk melakukan pemungutan suara ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang Tahun 2024 di seluruh TPS se-Kabupaten Deli Serdang, dalam waktu paling lama 4 bulan setelah putusan ini ditetapkan.
- 4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang untuk melaksanakan putusan ini.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

### 737. KETUA: SALDI ISRA [01:22:14]

Bu, ini pertanyaan untuk Kuasa hukum. Berapa kecamatan di Kabupaten Deli Serdang?

## 738. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 152/PHPU.BUP-XXIII/2025: PAUJIAH HANUM [01:22:19]

Kecamatan? 22, Yang Mulia.

### 739. KETUA: SALDI ISRA [01:22:20]

22. Apakah 22 kecamatan itu tegenang?

### 740. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 152/PHPU.BUP-XXIII/2025: PAUJIAH HANUM [01:22:23]

Yang terdampak terhadap bencana=12 kecamatan.

### 741. KETUA: SALDI ISRA [01:22:27]

Oke.

# 742. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 152/PHPU.BUP-XXIII/2025: PAUJIAH HANUM [01:22:27]

Tapi seluruh Deli Serdang mengalami hujan lebat, Yang Mulia.

### 743. KETUA: SALDI ISRA [01:22:30]

Oke. Yang terdampak karena hujan lebat itu 12 kecamatan?

# 744. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 152/PHPU.BUP-XXIII/2025: PAUJIAH HANUM [01:22:35]

12 kecamatan, siap.

### 745. KETUA: SALDI ISRA [01:22:37]

Tapi ketika itu hujan lebat semua, ya?

## 746. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 152/PHPU.BUP-XXIII/2025: PAUJIAH HANUM [01:22:39]

Ya, siap.

### 747. KETUA: SALDI ISRA [01:22:41]

Ditunda enggak, pelaksanaannya oleh mereka?

# 748. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 152/PHPU.BUP-XXIII/2025: PAUJIAH HANUM [01:22:44]

Tidak ditunda, Yang Mulia.

### 749. KETUA: SALDI ISRA [01:22:45]

Maksud saya ini, kalo pagi itu hujan lebat, ditunda sampai pukul 9, ada enggak yang kayak begitu?

## 750. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 152/PHPU.BUP-XXIII/2025: PAUJIAH HANUM [01:22:50]

Tidak, tidak ada, Yang Mulia.

#### 751. KETUA: SALDI ISRA [01:22:52]

Tetap, dalam hujan-hujan lebat ke pemilihan?

# 752. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 152/PHPU.BUP-XXIII/2025: PAUJIAH HANUM [01:22:54]

Ya, datang.

### 753. KETUA: SALDI ISRA [01:22:56]

Oh, ini (...)

# 754. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 152/PHPU.BUP-XXIII/2025: PAUJIAH HANUM [01:22:57]

Dan itu kita (...)

### 755. KETUA: SALDI ISRA [01:22:57]

Romantis.

# 756. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 152/PHPU.BUP-XXIII/2025: PAUJIAH HANUM [01:22:58]

Kita sudah lampirkan di dalam P kita yang (...)

### 757. KETUA: SALDI ISRA [01:23:00]

Kami, Bu. Jangan kita, Bu. "Kami lampirkan."

# 758. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 152/PHPU.BUP-XXIII/2025: PAUJIAH HANUM [01:23:03]

Oh, ya. Kami.

### 759. KETUA: SALDI ISRA [01:23:05]

Nanti Ibu mengajak-ajak kami (...)

# 760. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 152/PHPU.BUP-XXIII/2025: PAUJIAH HANUM [01:23:06]

Siap.

### 761. KETUA: SALDI ISRA [01:23:06]

Untuk terlibat di situ.

## 762. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 152/PHPU.BUP-XXIII/2025: PAUJIAH HANUM [01:23:07]

Ada video banjir (...)

#### 763. KETUA: SALDI ISRA [01:23:08]

Ya.

# 764. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 152/PHPU.BUP-XXIII/2025: PAUJIAH HANUM [01:23:09]

Yang Mulia. Di P-45 sampai P-54, dan P-58. Itu yang memvideokan adalah saksi-saksi kita di TPS, Yang Mulia.

### 765. KETUA: SALDI ISRA [01:23:19]

Saksi-saksi kami, Bu.

## 766. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 152/PHPU.BUP-XXIII/2025: PAUJIAH HANUM [01:23:21]

Saksi-saksi kami, Yang Mulia. Siap.

### 767. KETUA: SALDI ISRA [01:23:23]

Ya. Oke, Bu.

# 768. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 152/PHPU.BUP-XXIII/2025: PAUJIAH HANUM [01:23:24]

Siap.

### 769. KETUA: SALDI ISRA [01:23:24]

Cukup, ya?

# 770. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 152/PHPU.BUP-XXIII/2025: PAUJIAH HANUM [01:23:25]

Cukup. Terima kasih, Yang Mulia.

### 771. KETUA: SALDI ISRA [01:23:28]

Ya. Jadi 2 isu besar, ini. Satu, TSM, dan satu lagi ini soal (...)

## 772. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 152/PHPU.BUP-XXIII/2025: PAUJIAH HANUM [01:23:32]

Bencana alam.

#### 773. KETUA: SALDI ISRA [01:23:32]

Banjir, yang kata Beliau tadi menyebabkan kecilnya yang datang ke tempat pemungutan suara, hanya 32%. Tadi saya tanya, apakah semua kecamatan terdampak, cuma 12 kecamatan dari 24 kecamatan, Bu, ya?

## 774. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 152/PHPU.BUP-XXIII/2025: PAUJIAH HANUM [01:23:45]

Dari 22, Yang Mulia.

### 775. KETUA: SALDI ISRA [01:23:47]

Dari 22. 10 yang lain tidak, ya?

# 776. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 152/PHPU.BUP-XXIII/2025: PAUJIAH HANUM [01:23:49]

Ya. Cuma ada yang longsor daerah gunung.

### 777. KETUA: SALDI ISRA [01:23:51]

Ya. Oke, cukup?

# 778. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 152/PHPU.BUP-XXIII/2025: PAUJIAH HANUM [01:23:54]

Cukup, Yang Mulia. Terima kasih.

### 779. KETUA: SALDI ISRA [01:23:00]

Pak Ridwan? Ada yang mau ditambahkan? Cukup. Pak Arsul, cukup?

Kita senang nih, kalau ketemu lawyer kayak begini, enggak terlalu berputar-putar, begitu.

Poin, next, langsung ke Petitum, begitu.

Terakhir, untuk sesi siang ini, 257, silakan!

# 780. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 257/PHPU.GUB-XXIII/2025: DONAL FARIZ [01:24:19]

Terima kasih, Yang Mulia.

Izin, sebelum membacakan permohonan. Dari Perkara 257, kami meminta izin kepada Majelis kalau boleh ditampilkan PowerPoint.

### 781. KETUA: SALDI ISRA [01:24:32]

Boleh, sepanjang tidak di luar isi permohonan.

## 782. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 257/PHPU.GUB-XXIII/2025: DONAL FARIZ [01:24:36]

Baik, Yang Mulia.

### 783. KETUA: SALDI ISRA [01:24:37]

Nanti kalau ... kalau di luar isi permohonan, yang disampaikan, kita cut nanti. Silakan!

## 784. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 257/PHPU.GUB-XXIII/2025: DONAL FARIZ [01:24:42]

Baik (...)

### 785. KETUA: SALDI ISRA [01:24:42]

Sepanjang tidak melebihi 15 menit.

## 786. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 257/PHPU.GUB-XXIII/2025: DONAL FARIZ [01:24:44]

Baik, Yang Mulia.

Pertama, Perkara Nomor 257/PHPU.GUB-XXIII Tahun 2025, Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 3119 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 tertanggal 8 Desember 2024.

Kuasa Hukum dianggap dibacakan daftarnya, Yang Mulia.

Kewenangan Mahkamah Konstitusi dianggap dibacakan, Yang Mulia.

Tenggat Waktu Pengajuan Permohonan dan Tenggat Waktu Pengajuan Perbaikan Permohonan telah memenuhi jadwal, sebagaimana diatur di PMK, Yang Mulia.

### 787. KETUA: SALDI ISRA [01:25:31]

Ya.

### **KETUK PALU 1X**

# 788. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 257/PHPU.GUB-XXIII/2025: DONAL FARIZ [01:25:35]

Selanjutnya, Kedudukan Hukum Pemohon dalam ketentuan (...)

### 789. KETUA: SALDI ISRA [01:25:39]

PowerPoint-nya bisa di ... apa ... enggak ... munculkan, enggak? Tadi dikasih enggak, bahannya itu?

## 790. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 257/PHPU.GUB-XXIII/2025: DONAL FARIZ [01:25:43]

Bahan?

### 791. KETUA: SALDI ISRA [01:25:44]

Oh, itu ada di sini.

## 792. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 257/PHPU.GUB-XXIII/2025: DONAL FARIZ [01:25:44]

Di sebelah kiri dan kanan muncul, Yang Mulia.

### 793. KETUA: SALDI ISRA [01:25:45]

Ya. Oke, silakan!

## 794. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 257/PHPU.GUB-XXIII/2025: DONAL FARIZ [01:25:48]

Kedudukan Hukum Pemohon, Yang Mulia.

Ketentuan dalam selisih suara yang dibolehkan menjadi ambang batas adalah 1% dap ... tapi dalam perkara a quo, jumlah selisih suara itu lebih dari 1%, Yang Mulia. Namun, kami meminta kepada Majelis dalam perkara a quo untuk menunda pembelakuan Pasal 158 karena beberapa dalil terstruktur, sistematis, dan masif yang akan kami uraikan, Yang Mulia.

### 795. KETUA: SALDI ISRA [01:26:17]

Silakan!

## 796. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 257/PHPU.GUB-XXIII/2025: DONAL FARIZ [01:26:19]

1. Anomali surat-surat ... surat suara tidak sah di TPS pada Kota Makassar. Yang Mulia, kami tampilkan dua model kertas suara. Sebelah kiri adalah kertas suara untuk gubernur, sebelah kanan adalah kertas suara untuk wali kota. Khusus untuk di Kota Makassar,

jumlah surat suara yang tidak sah untuk gubernur, dua kali lipat dari surat suara yang tidak sah untuk wali kota. Dalam batas penalaran kami, Yang Mulia, kalau kita bicara pada kompleksitas surat suara dan banyaknya pilihan pasangan calon, mestinya error dalam proses pencoblosan lebih banyak di kertas suara yang jumlah pasangan calonnya lebih banyak. Tapi yang terjadi adalah sebaliknya. Lebih detail lagi, kami uraikan di dalam Dalil Permohonan kami, Yang Mulia.

2. Keterlibatan Aparatur Sipil Negara dalam mendukung Paslon Nomor 02. Ada beberapa bukti-bukti yang kami dalilkan, Yang Mulia. Dalam PPT juga kami sampaikan halaman berapa dan bukti berapa, Yang Mulia. Tapi yang paling kami highlight adalah pernyataan dari Pj Gubernur Sulawesi Selatan, Bapak Prof. Zudan Arif Fakrulloh yang dalam pernyataan beliau, sebagaimana bukti yang kami ajukan dalam Bukti P-7 menyatakan, "Pilihan Sulawesi Selatan hanya dua. Saya tidak bicara pasangan calon tertentu. Dua. Dua aman? Aman."

Kami tafsirkan itu arah dukungan kepada paslon tertentu, Yang Mulia.

Selanjutnya, sejumlah laporan juga kami sampaikan berkaitan dengan dugaan pelanggaran netralitas ASN ini dan ada beberapa poin yang juga terdapat di dalamnya. Next.

Paling krusial, Yang Mulia, adalah praktik nepotisme, kolusi, dan politik gentong babi (pork barrel politics) dalam pilkada di Provinsi Sulawesi Selatan.

Mohon ditampilkan, Bapak Panitera.

Ini, Yang Mulia. Calon Gubernur Sulawesi Selatan Nomor Urut 02, Andi Sudirman Sulaiman, merupakan adik kandung dari Andi Amran Sulaiman selaku Menteri Pertanian RI Definitif. Apa yang kami potret di sini, Yang Mulia. Adalah praktik nepotisme, kolusi, dan dugaan politik gentong babi. Data dalam bukti kami menyajikan, Yang Mulia, dalam rentang waktu setidaknya di tahap 1, 27 Mei 2024, ada anggaran senilai 2,9 triliun (...)

### 797. KETUA: SALDI ISRA [01:28:53]

Tapi 27 ... 2 ... 27 Mei itu belum ada pasangan calon, kan?

## 798. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR PERKARA 257/PHPU.GUB-XXIII/2025: DONAL FARIZ [01:28:57]

Betul. Kami menyebut ini dalam rentang waktu, Yang Mulia. Benar sekali, Yang Mulia.

### 799. KETUA: SALDI ISRA [01:29:01]

Ya, Terus.

## 800. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR PERKARA 257/PHPU.GUB-XXIII/2025: DONAL FARIZ [01:29:03]

2,9 triliun yang terdiri dari sejumlah bantuan, dianggap kami bacakan.

Tahap kedua, 10 Oktober 2024, jenis bantuannya kami sebutkan, jumlah bentuk ... bantuannya kami sebutkan, di berbagai macam tempat. Tapi yang menarik bagi kami, kami highlight adalah agaknya ini benar-benar terstruktur, dan sistematis dan masif, Yang Mulia. Karena kemudian yang maju di Pilkada Bone ... Pilkada ... Pilgub boba ... Bone adalah Andi Asman Sulaiman adik kandung dari Andi Amran Sulaiman. Jadi, sekali menebar, 2,3 kandidat jadi. Kira-kira begitu, Yang Mulia.

11 Oktober 2024, bantuan Alsintan juga, kami sampaikan jumlahnya 64 ... Rp65,4 miliar, Yang Mulia, dan 11 Oktober 2024 juga ada, sebanyak 43,2 miliar. Dalam rentang tahapan dan sebelum tahapan, kami catat ada sebanyak lebih-kurang 2,9 triliun yang ... rupiah, Yang Mulia. Apa yang mau ... kami mau bangun justifikasi untuk meyakinkan Majelis dalam perkara ini, Yang Mulia.

Selanjutnya. Dalam perkara Pilpres, Putusan 01 PHPU Pres/XXII/2024, Mahkamah telah mengingatkan kita semua kekhawatiran terkait implementasi dari konsep political budget cycle. Yakni, petahana akan menggenjot implementasi program pemerintah yang pada waktu yang berdekatan dengan jadwalnya, penyelenggaran pilkada yang akan diikutinya.

Jadi dampak politik pork barrel kepada representasi, kepada preferensi pemilih, dalam konteks Pilkada Provinsi Sulawesi Selatan.

Selanjutnya, Yang Mulia. Isu selain pork barrel dan kolusi di dalam anggaran dari pemerintah dalam bentuk APBN dan APBD, kami juga menemukan sejumlah fakta yang kami uraikan secara lebih detail dalam permohonan, perbaikan permohonan halaman 41 samapi 40 ... 82, Yang Mulia. Apa yang kami temukan, Yang Mulia? Adanya empat hal.

Satu, perbedaan tanda tangan pemilih antara KTP dengan Daftar Hadir Pemilih Tetap atau DHPT.

B, pengakuan dari petugas KPPS yang menyatakan bahwa dia sendiri yang menandatangani daftar hadir tersebut. Pengakuan dari pemilih yang hadir di TPS, tapi tidak diminta untuk menandatanganinya.

Dan terakhir, tanda tangan yang kasat mata, identik pada dua nama atau lebih yang tercantum dalam satu daftar hadir pemilih.

Yang Mulia, untuk memperkuat argumentasi tersebut, kami sudah menghadirkan bukti 135 TPS di Kota Makassar yang terdiri dari 86 kelurahan, 15 kecamatan di luar Kota Makassar karena pemilih Makassar terbesar, Yang Mulia. 15 persen lebih.

Di luar Kota Makassar, tapi masih dalam rentang Provinsi Sulawesi Selatan, kami menghadirkan 265 TPS yang terdari ... diri ... dari 233 desa, 125 kecamatan, dan 19 kabupaten/kota.

Izin, Yang Mulia. Contoh dari dugaan manipulasi itu kami tampilkan dalam slide kami, Yang Mulia. Daftar hadir dengan KTP, ini sudah kami lampirkan di dalam daftar bukti kami semuanya, Yang Mulia.

Selanjutnya, di P-59 kami juga hadirkan. Next. Ini contoh tanda tangan yang ditandatangani secara masif oleh satu KPPS dan kami sudah menemui KPPS untuk bertanya, tidak dalam rangka untuk mengidentifikasi, apa fakta yang sebenarnya. Ternyata menurut pernyataan affidavit yang bersangkutan di atas meterai menyatakan bahwa dia diperintahkan oleh KPPS satu untuk menandatangani seluruh daftar hadir tersebut.

Next, Yang Mulia. Tanda tangan identik pada TPS 002 Desa Tolo, Kecamatan Jelara[sic!], Kabupaten Jeneponto. Ini contoh, Yang Mulia. Sebelah kiri atas AAA, sebelah kanan atas RRR, sebelah kiri bawah SSS, sebelah kanan bawah NNN.

### 801. KETUA: SALDI ISRA [01:33:57]

Oke. Ini di TPS-TPS ini komposisi suaranya ada, enggak?

## 802. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 257/PHPU.GUB-XXIII/2025: DONAL FARIZ [01:34:00]

Kalau komposisi suara, memang kami tidak sajikan dalam dalil kami, Yang mulia. Itu memang (...)

### 803. KETUA: SALDI ISRA [01:34:04]

Ini kan mau melihat, apakah suaranya jatuh ke satu nomor atau tidak, kan itu harus dikorelasikan itu.

# 804. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 257/PHPU.GUB-XXIII/2025: DONAL FARIZ [01:34:10]

Baik, Yang Mulia.

### 805. KETUA: SALDI ISRA [01:34:11]

Mungkin tanda tangannya, ini oke lah ... apa ... Anda katakan ini mirip atau sama, tapi bagaimana komposisi suaranya? Nah itu, itu kan harus juga dis ... disodorkan ke kita.

## 806. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 257/PHPU.GUB-XXIII/2025: DONAL FARIZ [01:34:23]

Nah, kami berharap bisa masuk pembuktian untuk bisa membuktikan itu, Yang Mulia. Harapannya itu (...)

### 807. KETUA: SALDI ISRA [01:34:26]

Ini kan sudah saya sampaikan tadi, tahap awal ini semua bukti harus disodorkan.

# 808. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 257/PHPU.GUB-XXIII/2025: DONAL FARIZ [01:34:31]

Betul. Baik, Yang Mulia.

### 809. KETUA: SALDI ISRA [01:34:31]

Jadi ini satu hal, hal lainnya itu bagaimana korelasinya dengan ... dengan suara.

## 810. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 257/PHPU.GUB-XXIII/2025: DONAL FARIZ [01:34:37]

Betul.

#### 811. KETUA: SALDI ISRA [01:34:39]

Silakan lanjut.

# 812. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 257/PHPU.GUB-XXIII/2025: DONAL FARIZ [01:34:40]

Selanjutnya, Yang Mulia, di Bukti P-64 juga kami sajikan tanda tangan-tanda tangan yang identik, tidak sama, dan polanya sama.

#### 813. KETUA: SALDI ISRA [01:34:49]

Oke. Urusan tanda tangan sudah tadi, ya. Yang lain.

## 814. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 257/PHPU.GUB-XXIII/2025: DONAL FARIZ [01:34:50]

Oke. Tanda tangan sudah, Yang Mulia. Lebih jauh lagi, di slide selanjutnya. Next. Ini distribusi bukti kami, Yang Mulia. Next. Mohon bantuannya. Next.

Kami sudah meletakkan TPS mana, kabupaten mana, kecamatan mana, kelurahan dan TPS yang selanjutnya dan nomor absen berapa yang diduga tanda tangannya dimanipulasi, Yang Mulia.

Kenapa ini bisa terjadi? Hipotesis kami dan bukti yang kami temukan, Yang Mulia. Adalah problem dimulai dari C-6 tidak didistribusikan secara baik dan benar. Kami sudah mengutip dalam buktibukti yang kami sajikan, pernyataan sejumlah KPPS, Yang Mulia, di slide selanjutnya. Next. Next.

Surat pernyataan-pernyataan ini bagian dari bukti yang tidak terpisahkan. Surat pernyataan dari 10 KPPS yang menyatakan problem sama dalam distribusi C-6, alamatnya tidak diisi secara lengkap, alamatnya nomor rumahnya tidak diisi secara lengkap, akhirnya balik lagi. Itu beberapa persoalan yang kami dalilkan, Yang Mulia. Dan yang lain, juga terhambatnya pemilih, sejumlah pemilih yang berada dalam KK sama, Yang Mulia. Tetapi, kemudian memilih di TPS-TPS yang berbeda. Jadi, itu sejumlah dalil yang kami argumentasikan, dua persoalan masif utama di dalam Permohonan ini.

Selanjutnya, Petitum, Yang Mulia.

### 815. KETUA: SALDI ISRA [01:36:23]

Silakan.

## 816. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 257/PHPU.GUB-XXIII/2025: DONAL FARIZ [01:36:24]

Izin, Yang Mulia.

### 817. KETUA: SALDI ISRA [01:36:30]

Dibagi dengan apanya ... partnernya, silakan. Petitum.

## 818. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 257/PHPU.GUB-XXIII/2025: AMNASMEN [01:36:35]

Izin, Yang Mulia. Kami lanjutkan. Petitum.

1. Memohon mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

- Membatalkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulaweti[sic!] Selatan Nomor 3119 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024, tertanggal 8 Desember 2024, sepanjang menyangkut perolehan suara Pasangan Calon Nomor 2 atas nama Andi Sudirman Sulaiman dan Fatmawati Rusdi.
- 3. Menyatakan diskualifikasi Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Nomor Urut 2 atas nama Andi Sudirman Sulaiman dan Fatmawati Rusdi.
- 4. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan untuk menerbitkan Keputusan Penetapan Pasangan Calon Nomor 01 atas nama Mohammad Ramdhan Pomanto dan Azhar Arsyad sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024, dengan perolehan=1.600.029 suara.

#### Atau setidak-tidaknya.

- 1. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 3119 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 tertanggal 8 Desember 2024.
- 2. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan untuk melaksanakan pemungutan suara ulang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 di seluruh TPS, pada seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan.
- 3. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan untuk mengangkat Ketua dan Anggota KPPS, serta Ketua dan Anggota PPK pada tingkat KPU kabupaten/kota, kecamatan, kelurahan yang tersebar di seluruh Kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan.
- 4. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melakukan supervisi, koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan dalam rangka pelaksanaan putusan ini.
- 5. Memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk melakukan supervisi, koordinasi dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan dalam rangka pelaksanaan putusan ini.
- 6. Memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta jajaran, khususnya Kepolisian Daerah Provinsi Sulawesi Selatan beserta jajarannya, untuk melakukan pengamanan proses pemungutan suara ulang dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan dengan kewenangannya.

7. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan untuk melaksanakan putusan ini.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya, ex aequo et bono.

Cukup, demikian, Yang Mulia.

Terima kasih, Yang Mulia.

### 819. KETUA: SALDI ISRA [01:40:07]

Terima kasih.

Ada yang mau ditambahkan, Pak Arsul? Silakan!

### 820. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:40:12]

Sedikit, untuk Kuasa Pemohon, ya. Kalau saya baca ini Permohonan Anda tebal sekali, 105 halaman, ya. Yang terkait dengan me ... apa yang saya lihat, masifitas dalam arti daerah itu, ya. Itu terkait dengan apa yang Anda dalilkan sebagai dugaan pemalsuan tanda tangan.

Nah, saya ingin tanya, ini kalau soal, saya pakai istilah Anda, ya. Tentang "pork barrel" itu tadi, activities sebut saja begitu, itu di berapa kabupaten? Ada berapa totalnya, di Sulawesi Selatan Kabupaten/Kota?

## 821. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 257/PHPU.GUB-XXIII/2025: DONAL FARIZ [01:41:08]

Terima kasih, Yang Mulia.

Pertama, kami coba melakukan pelacakan APBN terkait dengan Anggaran Kementerian Pertanian, di Sub Bab Bagian Provinsi Sulawesi Selatan, sayangnya kami tidak mendapatkan data dukung dan data detail, soal itu, Yang Mulia.

Akhirnya metode yang kami lakukan adalah pemberitaan-pemberitaan dan kemudian penyerahan-penyerahan yang diafirmasi langsung oleh menteri yang bersangkutan, menyerahkan. Total itu yang kemudian akumulasi, kami temukan 2,9 triliun. Tapi secara spesifik, memang di gelombang kedua itu ada berapa tempatnya, Yang Mulia, kabupaten/kotanya.

### 822. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:41:50]

Jadi tempat kabupaten/kotanya tidak terlacak secara spesifik atau seperti apa?

## 823. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 257/PHPU.GUB-XXIII/2025: DONAL FARIZ [01:41:58]

Memang ada keterbatasan waktu bagi kami, Yang Mulia, untuk melakukan budgeting record dan mengejar lebih detail anggarananggaran ini. Karena data mentahnya pasti ada di Kementerian Pertanian, Yang Mulia. Tetapi kami tidak punya dapat akses ke situ.

### 824. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:42:14]

Oke, saya kira itu saja, Pak.

### 825. KETUA: SALDI ISRA [01:42:14]

Terima kasih. Yang Mulia Pak Ridwan? Cukup, ya.

Dengan demikian, selesai ini penyampaian Permohonan. Karena ini memang sesinya mereka, nanti sesi situ didengarkan pula dengan yang lain-lain. Sebelum ditutup, ini ada ... apa ... pengesahan bukti.

Untuk Perkara 39, ini ada kaitan dengan Surat Kuasa Pemohon. Terdapat 2 Surat Kuasa, namun Kuasa Hukum Pemohon atas nama Herwanto Semenguk dan Ernita Agustina belum melampirkan KTA. Nanti tolong dilampirkan KTA, Bu, ya.

Dan KTA Kuasa Hukum Pemohon atas nama R. Ananto Pratomo, Zainal Rahman, Erwin Gumara, Ernita Agustri, dan Herwanto sudah habis masa berlakunya, ya. Sudah ada yang baru enggak KTA-nya belum?

#### 826. PEMBICARA: [01:43:24]

Sudah, tetapi belum dibawa, Yang Mulia.

### 827. KETUA: SALDI ISRA [01:42:14]

Nah, nanti ... nanti dibawa, Bu, ya.

Kalau ... kemudian, KTA Kuasa Hukum Pihak Terkait atas nama Sinta Permatasari, Andana Marpaung, Ridwan Suherman sudah habis masa berlakunya.

Fotokopi KTA atas nama Atang Irawan, Bayu Aditya Putra, Rizki Dewi Ambarwati, Hanna Maria Manurung, dan Yulifah tidak jelas. Ini tidak jelasnya tanggal habisnya kapan dan segala macamnya. Ini ada juga modus sekarang ini, dibikin kabur itu tanggal berlakunya, supaya dianggap berlaku terus. Nanti ... apa ... datang ke bagian Kepaniteraan saja untuk menjelaskan soal yang begini, ya.

## 828. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 39/PHPU.BUP-XXIII/2025: AIDA MARDATILLAH [01:44:11]

Baik, Yang Mulia.

### 829. KETUA: SALDI ISRA [01:44:13]

Oke. Yang paling penting itu secara reguler itu harus diperbaharui KTA itu, supaya organisasi advokatnya jalan terus, begitu.

## 830. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 39/PHPU.BUP-XXIII/2025: AIDA MARDATILLAH [01:44:23]

Baik, Yang Mulia.

### 831. KETUA: SALDI ISRA [01:44:24]

Nah bukti, Pemohon menyampaikan Bukti P-1 sampai dengan P-26. Betul? Ya, Bu? Betul, tapi ini ada catatan, terdapat perbaikan pada daftar Alat Bukti P-2, disesuaikan dengan bukti fisiknya dan dianggap lengkap, ya. Disahkan.

### **KETUK PALU 1X**

Untuk Perkara 169 Kota Batam, KTA Kuasa Hukum Pemohon atas nama Khoirul Akbar, Sulhan, Fathur Rohim, Abdul Hakim, Erik Setiawan, Silvia Widya Astuti, fil ... Filemon Halawa, Makmur Susanto, sudah habis masa berlakunya.

Ada yang sadar itu sudah habis?

# 832. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 169/PHPU.WAKO-XXIII/2025: ABDUL HAKIM [01:45:13]

Ya, Yang Mulia.

Karena waktu itu masih belum habis dan itu memang untuk pendaftaran. Dan memang baru tanggal berapa kartu yang baru-baru terbit, Yang Mulia.

#### 833. KETUA: SALDI ISRA [01:45:22]

Sudah terbit, ya?

## 834. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 169/PHPU.WAKO-XXIII/2025: ABDUL HAKIM [01:45:23]

Alhamdulillah, Yang Mulia.

### 835. KETUA: SALDI ISRA [01:45:24]

Nah tolong disempurnakan, kalau sudah sadar itu disempurnakan cepat.

## 836. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 169/PHPU.WAKO-XXIII/2025: ABDUL HAKIM [01:45:26]

Siap, Yang Mulia.

### 837. KETUA: SALDI ISRA [01:45:27]

Ini kalau kurang duitnya, nanti saya kasih lah untuk urusanurusan yang kayak gitu.

KTA Kuasa Hukum Pihak terkait atas nama Wafdah Zikra Yuniarsyah, Raka Gani Pissani, Muhammad Rizki Ramadhan, Musthakim Alghosyaly, sudah habis masa berlakunya. Sama problemnya semua ini. Nanti saya bilang sama apanya ini, sama Ketua Organisasi Advokat. Enggak usah diperpanjang saja lagi kalau begitu.

Bukti Pemohon menyampaikan Bukti P-1 sampai Bukti P-18?

## 838. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 169/PHPU.WAKO-XXIII/2025: ABDUL HAKIM [01:45:58]

Ya, Yang Mulia.

#### 839. KETUA: SALDI ISRA [01:45:58]

Dengan catatan terdapat perbaikan pada daftar Alat Bukti P-7 dan P-11A disesuaikan dengan bukti fisiknya. Untuk Bukti P-7A, P-8, P-10A, dan P-11B agar dileges.

# 840. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 169/PHPU.WAKO-XXIII/2025: ABDUL HAKIM [01:46:12]

Siap, Yang Mulia.

### 841. KETUA: SALDI ISRA [01:46:13]

Yang sudah memenuhi syarat disahkan.

#### **KETUK PALU 1X**

151, seluruh kartu advokat ... nah, 151 expired. Waduh parahparah juga ini perilaku advokat kalau begini ini, ya. Itu segera dibenahi, kalau tidak, nanti kita enggak boleh masuk ruang sidang lho, ya. Karena bagian juga kami menghargai organisasi advokat. Kalau Anda tidak perpanjang kan, tidak menghargai organisasi advokat namanya. Ya nanti perpanjangannya disampaikan.

Ini Bukti P-1 sampai P-311, betul? Oh 31, ini P-1 sampai dengan P-31. Dengan catatan Bukti P-13 berupa Surat Pernyataan atas nama Ronal Tarihoran terkait dengan pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati TapTeng, namun di dalamnya ... di dalam daftar bukti tidak ada, ada buktinya, tapi tidak masuk daftar alat bukti, nanti diperbaiki.

Bukti P-26, Daftar Bukti dan Alat Bukti berbeda. Dalam daftar Bukti C.Hasil Salinan KWK TPS 001 Desa Hudopa Nauli, Kecamatan Kolang, namun dalam Bukti adalah TPS 003 Desa Hudopa Nauli, Kecamatan Kolang. Nanti diperbaiki ya, sepanjang yang tidak bermasalah kita sahkan.

### **KETUK PALU 1X**

Selanjutnya 152, Deli Serdang Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-57. Betul? Ini tambahan alat Bukti P-58 sampai dengan P-60 lengkap dan sudah diterima di persidangan.

Jadi, P-1 sampai dengan P-57, P-58 sampai dengan P-60 disahkan.

**KETUK PALU 1X** 

KTA, KTA Kuasa Pemohon Lengkap, KTA atas Nama Abdul Rozzak, Pihak Terkait ini ... Harahap, hanya berlaku sampai 31 Desember 2024. Ada, Abdul Rozzak?

## 842. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 152/PHPU.BUP-XXIII/2025: DONI HENDRA LUBIS [01:48:26]

Tidak ada, Yang Mulia.

### 843. KETUA: SALDI ISRA [01:48:27]

Tidak ada, tapi dia masuk Kuasa, kan?

### 844. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 152/PHPU.BUP-XXIII/2025: DONI HENDRA LUBIS [01:48:29]

Masuk Kuasa.

### 845. KETUA: SALDI ISRA [01:48:29]

Nanti diperbaiki!

# 846. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 152/PHPU.BUP-XXIII/2025: DONI HENDRA LUBIS [01:48:31]

Siap, Yang Mulia.

### 847. KETUA: SALDI ISRA [01:48:32]

Terakhir, 257. Sulawesi Selatan. KTA atas nama Donal Fariz, Amnasmen, Reyhan Rezki Nata, Adhisti Aprilia berlakunya sampai 31 Desember 2024. Tolong disegerakan, itu disampaikan perbaikannya. KTA dan BAS, Bukti Acara Sumpah ini ya, tidak ada atas nama Bagoes Carl ... Carlvito, Virda Wildan Syah, Fharefta Akmalia, Salsa Nabila H., Kevin Tedjakusuma, Maullana Tegar B., dan Muhammad Rafi Syamsudi. Terdapat tambahan 5 Kuasa pada tanggal 9 Januari.

KTA atas nama Hartini Fani Angraini, Heski Andika Wurara sudah habis masa berlakunya. Tolong itu di ... apa ... diperhatikan.

Kemudian Pihak Terkait, kuasa atas nama Andrian belum tanda tangan Surat Kuasa. Betul itu? Apa itu alasannya?

### 848. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 257/PHPU.GUB-XXIII/2025: ANWAR [01:49:36]

Yang Mulia, Andrian mengundurkan diri sebagai Kuasa.

### 849. KETUA: SALDI ISRA [01:49:40]

Kami kan tidak tahu, kalau tidak diberi tahu.

# 850. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 257/PHPU.GUB-XXIII/2025: ANWAR [01:49:45]

Ya, Yang Mulia.

### 851. KETUA: SALDI ISRA [01:49:45]

Jangan-jangan ini perbedaan soal pembagian mungkin, ini tidak tanda tangan. Ya?

## 852. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 257/PHPU.GUB-XXIII/2025: ANWAR [01:49:48]

Ya, Yang Mulia.

### 853. KETUA: SALDI ISRA [01:49:45]

Nanti diberi tahu, biar dicabut.

## 854. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 257/PHPU.GUB-XXIII/2025: ANWAR [01:49:51]

Ya, Yang Mulia.

### 855. KETUA: SALDI ISRA [01:49:51]

Kuasa KTA atas nama Andi Arfan Sahabuddin hanya berlaku sampai 31 Desember 2024.

# 856. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 257/PHPU.GUB-XXIII/2025: ANWAR [01:49:59]

Sudah ada yang baru, Yang Mulia.

#### 857. KETUA: SALDI ISRA [01:50:01]

Sudah ada yang baru.

Kalau begitu, kita sahkan Bukti P-1 sampai dengan P-68 lengkap, kemudian tambahan Bukti P-69 sampai dengan P-78 lengkap diterima di persidangan.

Ya, disahkan.

### **KETUK PALU 1X**

Sebelum kita tutup, kalau ada yang mau inzage, dipersilakan! Waktunya adalah pada jam kerja, pukul 08.00 sampai pukul 16.00, itu di Gedung 1, ada tempat khusus inzage. Ajukan Surat Permohonan, nanti akan diproses di situ. Satu.

Yang kedua sekali lagi, kami mengingatkan, lengkapi bukti-bukti. Ini sidang tidak pertarungan opini, tidak berkeras urat leher, tapi adalah penyajian bukti-bukti. Sampaikanlah bukti-bukti itu dengan sebanyak-banyaknya dan sebaik-baiknya.

Ada yang mau mengajukan pertanyaan? Cukup? Alhamdulillah. Ini satu-satunya sesi yang tidak ada keberatan. Alhamdulillah.

Dengan demikian, Sidang Pendahuluan untuk penyampaian Pokok Permohonan Pemohon untuk Perkara 39, 169, 151, 152, 257/PHPU Bupati, Walikota, dan Gubernur Tahun 2025 dinyatakan selesai. Sidang ditutup.

### **KETUK PALU 3X**

### **SIDANG DITUTUP PUKUL 14.47 WIB**

Jakarta, 9 Januari 2025 Plt. Panitera, **Wiryanto** 

